



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BULUNGAN



MALINAU



TARAKAN



TANA TIDUNG



NUNUKAN



Unduh Disini :





KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Taufiq dan Hidayah-Nya, Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 telah menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.

Buku ini disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, dengan harapan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan program pembangunan sebagai visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara **"Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa"**.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat langsung dalam tim untuk melaksanakan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.

"Mari kita terus bersama-sama untuk peduli dan bekerja nyata dalam mewujudkan Kaltara Terdepan"



Tanjung Selor, 5 Juni 2020
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

[Signature]
DR. H. IRIANTO LAMBRIE



Data kependudukan adalah variabel penting dalam menentukan arah pembangunan dan penentuan kebijakan pemerintah, karena data kependudukan adalah gambaran yang akurat dan akuntabel mengenai kondisi riil masyarakat pada suatu wilayah. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengamanatkan agar Gubernur (Kepala Daerah) menyusun Profil Perkembangan Kependudukan berskala provinsi. Untuk itu, Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan Kalimantan Utara pada tahun 2019.

Data kependudukan dalam buku ini adalah hasil pelayanan yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang kemudian dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan kemudian diolah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara bersama tim. Data dan informasi kependudukan di dalam buku ini tidak hanya berupa angka-angka kuantitatif, namun juga mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan, sehingga dalam penyusunan buku profil perkembangan kependudukan ini, kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Buku ini akan disajikan satu tahun sekali dengan menampilkan peta, tabel, grafik dan diagram sehingga dapat memperkirakan pertumbuhan penduduk tiap tahun secara berkelanjutan dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan atau rancangan program maupun kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Utara.

Semoga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ini dapat memberikan informasi terkait perkembangan kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga Pemerintah maupun swasta.

Janjung Selor, 2 Juni 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Utara,

Dis. H. SANUSI, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19720120 199301 1 001





DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Peraturan Perundangan.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Pengertian Umum / Daftar Istilah yang Digunakan.....	5
II. GRAFIKAN UMUM POTENSI DAERAH.....	11
A. Letak Geografis.....	11
B. Kondisi Topografi.....	12
C. Kondisi Iklim.....	15
D. Sumber Daya Air.....	16
E. Penggunaan Lahan.....	18
F. Potensi Pengembangan Ekonomi Sektoral.....	20
1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan.....	20
2. Sektor Hortikultura.....	20
3. Sektor Peternakan.....	21
4. Sektor Perkebunan.....	21
5. Sektor Kehutanan.....	22
6. Sektor Perikanan.....	22
7. Sektor Industri.....	22
8. Sektor Pariwisata.....	23
G. PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	24
1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 (c to c).....	24
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Tahun 2019 terhadap Triwulan IV Tahun 2019 (y to y).....	25
3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Tahun 2019 terhadap Triwulan III Tahun 2019 (q to q).....	25
H. PDRB Menurut Pengeluaran.....	27
1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 (c to c).....	27
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2019 (y-on-y).....	27
3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan III-2019 (q-to-q).....	28
I. Pertumbuhan PDRB Triwulan IV-2019 Menurut Provinsi Se- Kalimantan dan Wilayah Lainnya.....	30
J. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara, Maret – September 2019.....	30
III. KUANTITAS PENDUDUK.....	32
A. Persebaran (Distribusi) Penduduk.....	32
1. Jumlah dan Persebaran Penduduk.....	32



B.	Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.....	41
1.	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	41
2.	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio).....	43
3.	Piramida Penduduk.....	45
4.	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio).....	47
5.	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin.....	49
C.	Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial.....	50
1.	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir.....	50
2.	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.....	52
3.	Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga.....	54
4.	Status Hubungan dengan Kepala Keluarga.....	58
5.	Golongan Darah.....	60
IV.	KUALITAS PENDUDUK.....	62
A.	Kesehatan	62
1.	ASFR (Age Specific Fertility Rate).....	63
2.	Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR).....	64
B.	Pendidikan.....	65
C.	Perekonomian.....	68
1.	Proporsi Jenis Pekerjaan.....	68
2.	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran).....	71
D.	Sosial.....	72
1.	Angka Penyandang Cacat (Disabilitas).....	72
2.	Pencapaian Peserta KB Baru (PB).....	73
3.	Peserta KB Aktif (PA).....	74
V.	KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....	75
A.	Kepemilikan Kartu Keluarga.....	75
B.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	77
C.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).....	78
D.	Kepemilikan Akta.....	79
1.	Akta Kelahiran.....	79
2.	Akta Perkawinan.....	82
3.	Akta Perceraian.....	84
4.	Akta Kematian.....	85
VI.	PENUTUP.....	87
	DAFTAR PUSTAKA.....	88



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara.....	11
Tabel 2.2 Topografi Provinsi Kalimantan Utara.....	13
Tabel 2.3 Klasifikasi Lereng di Kalimantan Utara.....	13
Tabel 2.4 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Provinsi Kalimantan Utara.....	18
Tabel 2.5 Perbandingan Luas Areal Penggunaan Lahan, Areal Hutan dan Tubuh Air di Provinsi Kalimantan Utara.....	19
Tabel 2.6 Luas Tutupan Lahan Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Utara (Ha).....	19
Tabel 2.7 Luas Hutan (Ha) Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Utara (Ha).....	22
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan dan Distribusi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019 (Persen).....	26
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen).....	29
Tabel 2.10 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019 (persen).....	29
Tabel 2.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Utara Menurut Daerah, Maret 2019 – September 2019.....	31
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	32
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	34
Tabel 3.3 Rasio Penduduk Perbatasan di-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	36
Tabel 3.4 Rasio Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	38
Tabel 3.5 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2019.....	40
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	42
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	44
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Usia Produktif Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	47
Tabel 3.9 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	48
Tabel 3.10 Status Perkawinan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	49
Tabel 3.11 Status Perkawinan Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	50
Tabel 3.12 Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	51
Tabel 3.13 Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2019.....	51
Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	53
Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	54
Tabel 3.16 Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	57



Kalimantan Utara Tahun 2019.....	60
Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019	61
Tabel 4.1 Angka Kelahiran Menurut Umur di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	63
Tabel 4.2 Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	64
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	66
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	68
Tabel 4.5 Angka Pengangguran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	71
Tabel 4.6 Jumlah Penyandang Cacat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	72
Tabel 4.7 PPM dan Realisasi Pencapaian Peserta KB Baru Total Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2019.	74
Tabel 5.1 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.	76
Tabel 5.2 Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	77
Tabel 5.3 Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.	78
Tabel 5.4 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019	80
Tabel 5.5 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-18 Tahun di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	81
Tabel 5.6 Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019	82
Tabel 5.7 Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019	84
Tabel 5.8 Jumlah Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019	86





Gambar 5.2	Grafik Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	78
Gambar 5.3	Grafik Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	79
Gambar 5.4.	Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019	80
Gambar 5.5	Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-18 Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.....	82
Gambar 5.6	Grafik Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.	83
Gambar 5.7	Grafik Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.	85
Gambar 5.8	Grafik Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.	86





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah salah satu respon terhadap pentingnya ketersediaan informasi kependudukan secara transparan serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pemerintah. Data kependudukan adalah sumber penting sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan. Ini tak lepas dari perubahan paradigma pembangunan dari hanya pembangunan infrastruktur fisik menjadi *Humanizing-Development*, pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam paradigma ini, penduduk tidak lagi ditempatkan sebagai objek, namun menjadi subjek dari pembangunan tersebut. Atas dasar itulah tersedianya data kependudukan menjadi sangat penting, karena didalamnya merekam dinamika perkembangan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Data kependudukan tidak hanya bersifat kuantitatif, namun juga berusaha menjelaskan dinamika perkembangan yang bersifat kualitatif.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan agar pembangunan di bidang kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang bertujuan menyediakan data dan informasi kependudukan skala nasional, provinsi dan kota/kabupaten, dan dapat dijadikan acuan dasar bagi sektor atau lembaga-lembaga lain (pemerintah maupun swasta) dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.



Penyusunan Buku Profil Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 ini adalah usaha untuk menyediakan data kependudukan yang valid, yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) dan tersimpan didalam basis data kependudukan, serta dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah pusat.

Variabel data yang disajikan disini adalah hasil registrasi kependudukan di tiap-tiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Variabel-variabel tersebut meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan.

B. Peraturan Perundangan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 695).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

C. Tujuan

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 ini disusun dengan menggunakan data yang dihasilkan dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan sumber data lainnya, dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan wilayah Provinsi Kalimantan Utara;



2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan;
3. Menyediakan data dan informasi bagi pemerintah provinsi yang berkelanjutan untuk merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan serta perencanaan program/kegiatan;
4. Mempermudah masyarakat luas memperoleh informasi kependudukan Provinsi Kalimantan Utara secara umum.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan profil perkembangan kependudukan ini mencakup 5 (lima) hal pokok yaitu antara lain :

- 1) Menyajikan perkembangan kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak jelas apa yang sudah berlangsung;
- 2) Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan sehingga mendapat pelayanan tepat sasaran;
- 3) Dari point 1) dan 2) teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional;
- 4) Mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
- 5) Mendorong percepatan terwujudnya satu data kependudukan untuk analisa pembangunan daerah.

Buku Profil Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 ini secara garis besar menyajikan data sebagai berikut:

- A. Persebaran (Distribusi) Penduduk
- B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi
- C. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- D. Kualitas Penduduk : Kesehatan, Pendidikan, Perekonomian, Angka Pengangguran
- E. Kepemilikan Dokumen Kependudukan
 1. Kepemilikan Kartu Keluarga



2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
3. Kepemilikan Akta : Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian

E. Pengertian Umum / Daftar Istilah Kependudukan

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor;
4. **Data Kependudukan** adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. **Perkembangan Kependudukan** adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
6. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal;
7. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan bermartabat;
8. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi;
9. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;



11. **Peristiwa Kependudukan** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
12. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
13. **Kematian atau Mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
14. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
15. **Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
16. **Penduduk Musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
17. **Mobilitas Penduduk Pulang-Balik atau Pulang-Pergi (commuting)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
18. **Angka Migrasi Masuk** adalah banyaknya migrasi masuk disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
19. **Angka Migrasi Keluar** adalah banyaknya migran keluar di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
20. **Angka Migrasi Netto** adalah selisih banyaknya migran masuk dan keluar disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
21. **Angka Migrasi Bruto** adalah jumlah migrasi masuk (datang) dan jumlah migrasi keluar (pindah) disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
22. **Migrasi Kembali (return migration)** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;



23. **Migrasi Semasa Hidup (life time migration)** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
24. **Migrasi Risen (recent migration)** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kel/kec/kab/kota/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
25. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;
26. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
27. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
28. **Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha;
29. **Penduduk yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan pensiun;
30. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dan disampaikan penduduk sebagai pekerjaannya pada saat melaporkan biodatanya kepada petugas registrasi penduduk di kelurahan/desa/dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
31. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
32. **Mencari Pekerjaan atau Pengangguran Terbuka** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha;
33. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah;
34. **Mengurus Rumah Tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang



- membantu rumah tangga; sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja;
35. **Kegiatan lainnya** adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan diluar jenis pekerjaannya yang telah ditetapkan;
36. **Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah);
37. **Jenis Pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh penduduk;
38. **Status Pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan;
39. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja;
40. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
41. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
42. **Lahir Hidup** adalah
- suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;
 - banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
43. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda -tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
44. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** adalah rata -rata banyaknya anak yang akan dimiliki seseorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
45. **Kematian atau Mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
46. **Angka Kematian Bayi Baru Lahir** adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28 hari) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;



47. **Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir** adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
48. **Angka Kematian Bayi / IMR** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9 -11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
49. **Angka Kematian Ibu / MMR** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
50. **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
51. **Pengeluaran untuk makanan** adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan);
52. **Penduduk Melek Huruf** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, latin, dan angka;
53. **Buta Huruf** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang belum bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, latin dan angka;
54. **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12,13-15,16-18, dan 19-24 tahun;
55. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah persentase jumlah peserta didik SD/Sederajat usia 7 -12 tahun, jumlah peserta didik SLTP/Sederajat usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA/Sederajat usia 16 -18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS/Sederajat usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
56. **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
57. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;



58. **Proporsi Penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;
59. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
60. **Piramida Penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik berbentuk piramida;
61. **Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 -64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;
62. **Rasio Kepadatan Penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau beberapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;
63. **Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu;
64. **Angka Perkawinan Umum** adalah yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;
65. **Angka Perceraian Kasar** adalah yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu;
66. **Angka Perceraian Umum** adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.



BAB II GAMBARAN UMUM POTENSI DAERAH

A. Letak Geografis

Berdasarkan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara diketahui memiliki luas lautan seluas 11.579 Km² (13% dari luas wilayah total) dengan-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Negara Sabah (Malaysia)

Sebelah Timur : Laut Sulawesi

Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah Barat : Negara Sarawak (Malaysia)

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas $\pm 75.467,70$ km², terletak pada posisi antara 114° 35' 22" – 118° 03' 00" Bujur Timur dan antara 1° 21' 36" - 4° 24' 55" Lintang Utara, memiliki luas lautan seluas 11.579 Km² (13% dari luas total wilayah), dan memiliki garis perbatasan langsung sepanjang 1.038 km dengan Malaysia. Posisi geo-politik Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat provinsi ini berada di posisi pertahanan dan keamanan negara yang strategis. Provinsi ke-34 ini juga berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/*Archipelagic Sea Lanes Passage*) dan merupakan pintu keluar/*outlet* ke Asia Pasifik.¹

Tabel 2.1: Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (Km ²)	Jumlah	Jumlah
Bulungan	Tanjung Selor	13.925,72	10	81
Malinau	Malinau	42.620,70	15	109
Nunukan	Nunukan	13.841,90	19	240
Tana Tidung	Tideng Pale	4.828,58	5	32
Tarakan	Tarakan	250,80	4	20
TOTAL		75.467,70	53	482

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

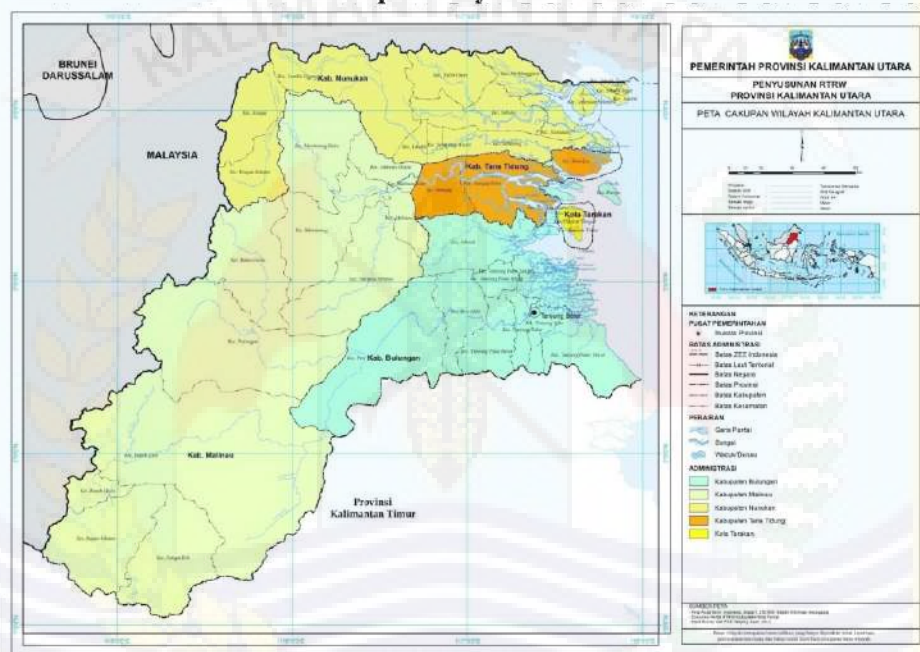
Malinau merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Utara (56%) dan terkecil adalah Kota Tarakan (1%). Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara berupa pegunungan dan kepulauan. Pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3.597 m². Pulau-pulau terbesar diantaranya yaitu

¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara



Pulau Tarakan (249 m²), Pulau Sebatik (245 m²), Pulau Nunukan (233 m²), Pulau Tanah Merah (352 m²). Panjang garis pantai provinsi ini adalah 3.955 Km, 908 Km (23%) merupakan garis pantai daratan, dan 3.047 Km (77%) merupakan garis pantai kepulauan. Potensi sebagai daerah baru yang sedang berkembang pesat, menjadi faktor menarik bagi para pendatang menuju Kaltara. Hal ini berdampak pada kemajemukan masyarakatnya. Beberapa etnis atau suku yang mewarnai kemajemukan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Etnis Dayak, Etnis Tidung, Etnis Bulungan, Etnis Banjar, Etnis Bugis, Etnis Jawa, Etnis Sunda, Etnis Tionghoa, dan lain-lain

Gambar 2.1 Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

B. Kondisi Topografi

Topografi adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk didalamnya perbedaan kemiringan lereng, panjang lereng, bentuk lereng, dan posisi lereng. Topografi dalam proses pembentukan tanah mempengaruhi² : 1) jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah; 2) dalamnya air tanah; 3) besarnya erosi; 4) arah gerakan air berikut bahan terlarut di dalamnya dari satu tempat ke tempat lain. Topografi juga merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan

² Daud S. Saribun, *Pengaruh Jenis Penggunaan Lahan dan Kelas Lereng Terhadap Bobot Isi, Porositas Total, dan Kadar Air Tanah Pada Sub-Das Cikabpujung Hulu*, Laporan Penelitian, Universitas Padjajaran, 2007



studi terperinci tentang permukaan bumi, termasuk perubahan pada permukaan seperti pegunungan dan lembah serta fitur lainnya seperti sungai dan jalan. Kondisi topografi adalah elemen dasar suatu wilayah untuk mengetahui karakter fisik suatu daerah. Karakteristik fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi di suatu daerah.

Tabel 2.2: Topografi Provinsi Kalimantan Utara

N o.	Kabupaten / Kota	Kelas Ketinggian					
		0-7 m	7-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	>1000m
1	Bulungan	213.561	249.257	220.119	531.364	193.172	273.749
2	Malinau	11.687	77.937	532.349	831.204	2.258.433	151.317
3	Nunukan	174.434	138.156	199.312	115.112	284.981	269.467
4	Tana Tidung	11.034	246.733	51.029	22	302	-
5	Tarakan	6.920	18.160	-	-	-	-
TOTAL		417.636	730.243	1.002.809	1.477.702	2.736.888	694.533

(Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir separuh dari total luas wilayah Kalimantan Utara memiliki ketinggian antara 500-1.000 mdpl (38,77%), hanya sekitar 5,92% yang memiliki kelas ketinggian 0-7 mdpl. Perkembangan pembangunan diperkirakan akan mengelompok di wilayah yang memiliki ketinggian relatif lebih landai, sedangkan wilayah pegunungan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dijadikan kawasan lindung dan *recharge area* (daerah resapan air). Sebagian besar wilayah Kabupaten Bulungan berada pada ketinggian 100-500 mdpl (31,61%). Kabupaten Malinau dan Nunukan didominasi oleh wilayah yang berada di kelas ketinggian 500-1.000 mdpl, yaitu masing-masing 58,46% dan 24,12%. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 7-25 mdpl dan hanya sebagian kecil yang memiliki ketinggian 100-500 mdpl (0,01%). Sedangkan Kota Tarakan didominasi oleh kelas ketinggian 7-25 mdpl (72,41%), sementara sisanya (27,59%) berada pada ketinggian 0-7 mdpl.

Table 2.3: Klasifikasi Lereng di Kalimantan Utara

N o	Kabupaten	Kelas Lereng/Kemiringan				Jumlah (Ha)
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%	
1	Bulungan	319.440	185.018	216.359	590.017	1.310.834
2	Malinau	13.500	72.500	147.177	3.745.417	3.978.594
3	Nunukan	287.739	6.039	81.639	990.129	1.365.546
4	Tana Tidung	134.202	159.013	15.573	22.052	330.840
5	Tarakan	6.154	1.984	17.044	0	25.182
Kalimantan Utara		761.035	424.554	477.792	5.347.615	7.010.996
Persentase (%)		10,85	6,06	6,81	76,27	100

(Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020)



Suatu permukaan tanah yang miring dengan sudut tertentu terhadap bidang horizontal disebut sebagai lereng. Lereng ini dapat terjadi secara alamiah atau buatan.³ Kemiringan lereng menunjukkan besarnya sudut lereng dalam persen atau derajat. Dua titik yang berjarak horizontal 100 meter yang mempunyai selisih tinggi 10 meter membentuk lereng 10 persen. Kecuraman lereng 100 persen setara dengan kecuraman 45 derajat. Sebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh wilayah dengan kemiringan lereng >40%, dengan persentase mencapai 76,27% dari luas wilayah provinsi ini (5.347.615 Ha). Kondisi topografi Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Bulungan didominasi oleh kemiringan lereng di atas 40%, khususnya wilayah bagian tengah dan barat yang sebagian besar merupakan hulu sungai. Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh kemiringan lereng 0-2% dan 2-15%. Sedangkan Kota Tarakan didominasi oleh wilayah yang agak curam 15-40%. Pegunungan atau perbukitan yang tersebar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebagai berikut :

- Kabupaten Bulungan, yaitu Gunung/Bukit Brun, Ubut Lebung, Sombang, Bekayan, Sondong, Gunung Putih, Mara, Sekatak, Kelu, Kundas, Setarat, Takin, Silid, Rian, Aung, Jatu;
- Kabupaten Malinau, yaitu gunung/bukit Laga Tumu, Murjake, Bukit Kalung, Bukit Rapat, Bulu, Kujan, Kelembit, Bukit Lalau, Bakayan, dan Klawit; dan
- Kabupaten Nunukan, yaitu Gunung/Bukit Krayan, Tidaliputu, Pawan, Bukit Titeh, Tudadaun, Depuan, Pangodam, Budukusia, Tungkam, Lelangit, Ruanting, Batu Maja, Pempuanang, Mansel, Ambalia, Muluk, Batu Bengalun, Klawit (Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2015).
- Sementara wilayah pantai, rawa pasang surut, daratan aluvial, jalur endapan, dan sungai berada di kawasan pesisir timur, sedangkan wilayah dataran dan lembah aluvial umumnya mengikuti arah aliran sungai.

Kenapa pembahasan kemiringan lereng ini penting? Karena dalam proses pembangunan, tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan lahan dengan kemiringan tertentu. Pembangunan di atas tanah lereng memiliki resiko tinggi terhadap bahaya longsor. Faktor yang harus diperhatikan dalam menghindari kelongsoran adalah kemiringan lereng itu sendiri.⁴ Selain itu, pemilihan bentuk dan dimensi

³ Lereng yang terbentuk secara alamiah misalnya lereng bukit dan tebing sungai, sedangkan lereng buatan manusia antara lain yaitu galian dan timbunan untuk membuat jalan raya dan jalan kereta api, bendungan, tanggul sungai dan kanal serta tambang terbuka (Deden Rusdian Maulana, *Mekanika Tanah II*, makalah, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2014)

⁴ Longsor adalah pergerakan material tanah seperti tanah, air dan batuan yang kemudian menurun lereng yang terjadi apabila faktor pendorong lebih besar dibandingkan dengan faktor penahannya. Faktor penahan merupakan faktor yang ada di dalam material tanah itu sendiri (kekuatan tanah dan struktur batuan yang ada di dalamnya), sedangkan faktor pendorong adalah faktor yang memicu terjadinya material di dalam tanah bergerak



pondasi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan guna memperoleh daya dukung yang diinginkan. Secara umum, ada beberapa jenis longsor yang sering terjadi di Indonesia, yaitu:⁵

1. Longsoran Translasi: Bergeraknya material tanah pada kondisi tanah yang bertopografi rata atau menggelombang landai.
2. Longsoran Rotasi: merupakan pergerakan material tanah yang terjadi di dalam bidang yang berbentuk cekung sehingga seringkali terjadi perputaran atau rotasi di dalam bidang cekung tersebut.
3. Pergerakan Blok: merupakan pergerakan batuan yang ada di dalam tanah pada bidang yang datar atau landai. Kondisi ini juga seringkali dinamakan dengan longsor blok batu dengan jumlah batu yang biasanya masif.
4. Runtuhan Batu: merupakan kondisi dimana terjadi runtuh batu secara langsung dan terjun bebas dari atas ke bawah. Hal ini biasanya terjadi pada bukit yang terjal dengan lereng yang cukup curam dan ini sering ditemukan di tebing pantai.
5. Rayapan Tanah: terjadi karena adanya rayapan atau pergerakan tanah yang sangat lambat dan halus. Ini biasanya terjadi pada tanah yang memiliki butiran kecil halus dan namun memiliki struktur yang cukup kasar. Biasanya jenis tanah longsor ini hampir tidak bisa dikenali dan kalau longsor sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama baru bisa dikenali dengan miringnya tiang-tiang listrik, rumah dan lainnya yang berada di atasnya.
6. Aliran Bahan Rombakan: terjadi karena adanya pergerakan tanah dan materialnya yang disebabkan oleh dorongan air yang sangat kuat. Kecepatan dari aliran air sendiri akan sangat tergantung pada kemiringan lereng, volume air, tekanan air, kecepatan air serta jenis material tanahnya itu sendiri apakah mudah terangkut oleh air atau tidak. Gerakan dari tanah longsor ini lumayan cepat dan bisa mencapai seluruh lembah dengan jarak ratusan meter jauhnya.

C. Kondisi Iklim

Iklim adalah keadaan cuaca suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 11-30 tahun. Indonesia secara keseluruhan dikelilingi oleh Samudra dan Lautan, sehingga memiliki iklim tropis basah. Secara umum, kondisi iklim Provinsi Kalimantan Utara hampir sama dengan wilayah lain di

sehingga menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor ini akan sangat mudah terjadi apabila faktor pendorong di lereng tanah lebih besar dibandingkan dengan faktor penahan yang ada. <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/jenis-jenis-longsor>, diakses pada 5 Maret 2019 pukul 15.36 WITA

⁵ Ibid



Indonesia yaitu beriklim tropis,⁶ dengan ciri-ciri: (1) Setiap tahunnya suhu udara akan cukup tinggi, karena memperoleh sinar matahari yang cenderung vertikal; (2) Suhu udara rata-rata tidak kurang dari 18 derajat celcius bahkan sampai 27 derajat celcius. Saat mengalami musim hujan dan musim kemarau pun tidak memiliki perbedaan berarti. (3) Dalam setiap pergantian hari adalah 24 jam dimana siang dan malam hari masing-masing memiliki waktu selama 12 jam; (4) Wilayah iklim tropis basah membuat suatu wilayah ditumbuhi banyak tanaman hijau yang lebat. Wilayah ini mampu mempengaruhi perubahan iklim yang sangat signifikan.⁷

Kondisi iklim suatu wilayah berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat, sehingga corak kehidupan tiap wilayah juga pasti akan berbeda. Di bidang agraris (pertanian dan perkebunan), iklim berpengaruh signifikan terhadap pola pekerjaan pada bidang ini. Banyak petani dan pekebun di Kalimantan Utara yang mengandalkan iklim dalam bercocok tanam, misalnya tanaman yang cocok ditanam oleh petani/pekebun di musim hujan adalah padi, sawi, kubis, caisim, bayam, kangkung, terong, kacang panjang, timun, semangka, melon. Mereka biasanya juga memperhitungkan bulan jatuhnya panen agar tepat waktu. Tanaman yang cocok ditanam saat musim kemarau adalah jagung, ubi, ketela, tomat, kentang, kacang tanah, kacang hijau, labu. Jenis tanaman umbi-umbian justru menghasilkan kualitas umbi yang baik apabila dipanen saat musim kemarau. Sedangkan tanaman yang cocok ditanam di musim pancaroba (peralihan) diantaranya adalah padi, cabai, tomat, terong, timun, semangka, melon, umbi-umbian, dan sayur-sayuran.

D. Sumber Daya Air

Provinsi Kalimantan Utara bukanlah daerah kering. Kalimantan Utara memiliki potensi Sumber Daya Air yang sangat besar berupa air permukaan (aliran sungai, danau, rawa), air tanah, dan curah hujan yang tinggi. Potensi besar tersebut banyak dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat di provinsi ini. Kawasan resapan air terletak di daerah pegunungan dan perbukitan yang terletak di bagian barat, di antaranya terdapat di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan, sedangkan kawasan tangkapan air terletak di bagian timur yang berupa dataran aluvial dan dataran fluvial.

⁶ Letak provinsi ini berada di utara lintang 0°. Suhu udara maksimal dengan 34,40° C dan minimal yaitu 21,00° C. Kondisi rata-rata kelembapan udara mencapai angka 78% serta memiliki tekanan udara rata-rata 920,2 mb. Untuk keadaan kecepatan angin terdapat dalam *range* yang tidak fluktuatif, yaitu 3-5 knot dari tahun 2013-2017. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 412 mm, paling rendah terjadi dengan 181 mm. Rata-rata penyinaran matahari cukup fluktuatif dengan rata-rata terjadi 37% penyinaran. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara 2017*, Disdukcapil Kalimantan Utara tahun 2018

⁷ <https://www.geologinesia.com/2018/05/mengenal-ciri-ciri-iklim-tropis.html>, diakses pada 6 Maret pukul 11.33 WITA



Sungai merupakan bagian penting dari DAS, dan sangat berperan penting bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil inventarisasi jumlah sungai dalam dokumen SLHD tiap Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 123 sungai. Untuk kategori sungai terpanjang, Sungai Kayan menjadi yang utama dengan panjangnya yang mencapai 576 km. Sungai-sungai yang ada di wilayah ini antara lain adalah Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Pimping, Sungai Bandan, Sungai Sekatak, Sungai Jelarai, Sungai Linuang Kayan, Sungai Betayau, Sungai Sembakung, Sungai Mandul, Sungai Semandak, Sungai Mintut, Sungai Manguli. Sungai tersebut merupakan media transportasi air bagi masyarakat. Selain itu, sungai tersebut juga sebagai sumber mata pencaharian nelayan tradisional di wilayah ini (Profil Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2014).

Kalimantan Utara hanya memiliki 1 danau yaitu Danau Kelaputan Mangkupadi yang terletak di Kabupaten Bulungan seluas 6 ha. Sementara untuk waduk dan embung semakin bertambah. Pada 2014, Kalimantan Utara memiliki 24 buah waduk dan 10 embung, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 9 buah waduk dan 11 embung. Sedangkan situ (danau wisata) tidak terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Waduk yang terluas dan volume paling besar di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Waduk Irigasi Binusan di Kabupaten Nunukan dengan luas 3,6 ha dan volume 3000 m³. Sementara itu, Embung Air Baku Bolong di Kabupaten Nunukan menjadi embung terluas dan memiliki volume terbesar di provinsi ini. Luas embung tersebut yaitu 13,44 ha dengan volume 294.500 m³.

Sesuai UU No.7 tahun 2004, wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;



- g. Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- h. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- i. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. Membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- k. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- l. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

E. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh hutan, dengan luasan mencapai 6.440.254 Ha atau sekitar 90,06% dari luas total wilayah. Luas pertanian tersebar sekitar 1,55% atau 110.751 Ha dari total luas wilayah. Penggunaan lahan hutan negara mendominasi di seluruh kabupaten, namun terbanyak terdapat di Kabupaten Malinau. Kondisi geografis provinsi ini yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam, sebagian besar dimanfaatkan sebagai hutan lindung.⁸

Penggunaan lahan permukiman hanya 19.090 Ha atau 0,27% dari total luas wilayah provinsi ini, dengan sebaran lahan permukiman paling tinggi berada di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.4: Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Penggunaan Tanah				
		Permukiman	Hutan	Pertanian	Pertambangan	Lainnya
1	Bulungan	4.925	1.086.969	12.040	-	237.497
2	Malinau	2.687	3.927.395	2.301	1.550	42.808
3	Nunukan	6.609	1.167.764	87.254	-	166.952
4	Tana Tidung	1.867	250.506	3.786	1.415	77.563
5	Tarakan	3.002	7.620	5.370	5.914	47.363
Kalimantan Utara		19.090	6.440.254	110.751	8.879	572.183
Persentase (%)		0,27	90,06	1,55	0,12	8

Sumber : BAPPEDA Prov. Kaltara

⁸ RPJMD Perubahan Kalimantan Utara 2016-2021



Sedangkan, jika dilihat dari SK Menteri Kehutanan No. 718 Tahun 2014, perbandingan luas areal penggunaan lahan dengan areal hutan dan tubuh air dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Perbandingan Luas Areal Penggunaan Lahan, Areal Hutan, dan Tubuh Air
di Provinsi Kalimantan Utara

Kawasan	Kabupaten Bulungan		Kota Tarakan		Kabupaten Malinau		Kabupaten Nunukan		Kabupaten Tana Tidung		Provinsi Kalimantan Utara	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
Areal Penggunaan Lain	412.587,27	29,2	18.147,74	72,2	320.337,60	8,08	451.545,18	32,7	161.242,51	46,4	1.363.860,30	19,1
Hutan Lindung	224.769,60	15,9	6.997,33	27,83	675.398,51	17,04	158.014,95	11,45	0	0	1.065.180,39	14,9
Hutan Produksi	259.162,53	18,33	0	0	365.157,98	9,21	275.774,53	19,98	151.120,97	43,47	1.051.216,01	14,7
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	0	0	0	0	30.117,50	0,76	13.513,89	0,98	9.876,67	2,84	53.508,06	0,75
Hutan Produksi Terbatas	507.803,51	35,92	0	0	1.565.329,71	39,5	190.350,83	13,79	9.084,26	2,61	2.272.568,31	31,9
Tubuh Air	0	0	0	0	997.699,21	25,17	274.380,39	19,88	0	0	1.272.079,60	17,8

Sumber: SK Menteri No. 718/2014 dalam Materi Teknis RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

Penggunaan lahan didominasi oleh hutan lebih dari 90% yang terdiri atas hutan primer dan hutan sekunder dengan luas hampir 6,5 juta hektar. Proporsi hutan terbesar, yaitu di Kabupaten Malinau seluas 3,9 juta hektar dan Kabupaten Bulungan serta Nunukan dengan luasan wilayah hutan yang mencapai 1 juta hektar. Proporsi kawasan budidaya hanya mencapai angka 5,97% dari seluruh total luasan tutupan lahan. Secara lebih jelas, luas tutupan lahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

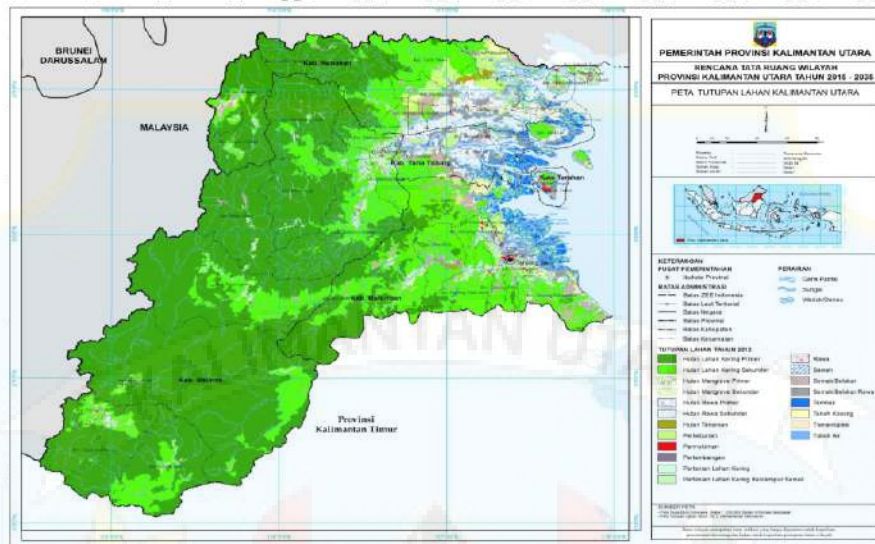
Tabel 2.6
Luas Tutupan Lahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)

Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)											
	Kabupaten Bulungan		Kota Tarakan		Kabupaten Malinau		Kabupaten Nunukan		Kabupaten Tana Tidung		Jumlah	
Hutan Lahan Kering Primer	246.781,86	20,77%		0,00%	3.092.180,92	80,45%	707.612,51	45,50%		0,00%	4.046.575,29	58,22%
Hutan Lahan Kering Sekunder	627.781,65	52,83%	8.027,22	33,01%	641.632,90	16,69%	299.725,12	19,27%	69.453,26	20,47%	1.646.620,15	23,69%
Hutan Rawa Primer		0,00%		0,00%		0,00%	1.298,99	0,08%		0,00%	1.298,99	0,02%
Hutan Rawa Sekunder	7298,44	0,61%		0,00%	962,14	0,03%	213.551,18	13,73%	40.887,65	12,05%	262.699,41	3,78%
Hutan Tanaman		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	9.803,38	2,89%	9.803,38	0,14%
Hutan Mangrove Sekunder	65.530,42	5,51%	289,32	1,19%		0,00%	67.841,59	4,36%	24.239,92	7,14%	157.901,25	2,27%
Perkebunan		0,00%		0,00%		0,00%	32.213,19	2,07%		0,00%	32.213,19	0,46%
Permukiman	1100,23	0,09%	1.236,22	5,08%	1.482,12	0,04%	700,41	0,05%	614,01	0,18%	5.132,99	0,07%
Emplacement		0,00%	65,49	0,27%		0,00%		0,00%		0,00%	65,49	0,001%
Pertanian Lahan Kering	1627,46	0,14%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.627,46	0,02%
Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	97.115,04	8,17%	10.197,93	41,93%	67.529,48	1,76%	13.147,57	0,85%	37.969,89	11,19%	225.959,91	3,25%
Rawa	2313,41	0,19%	74,45	0,31%		0,00%	3.163,20	0,20%	1.897,45	0,56%	7.448,51	0,11%
Sawah		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	17.122,89	1,10%		0,00%	17.122,89	0,25%
Semak Belukar	61.688,45	5,19%	2.834,62	11,66%	28.581,95	0,74%	88.095,68	5,67%	8.102,05	2,39%	189.302,75	2,72%
Semak/Belukar Rawa	13.618,55	1,15%	48,88	0,20%	11.051,98	0,29%	94.888,83	6,10%	88.976,54	26,23%	208.584,78	3,00%
Tambak	62.381,01	5,25%	1.546,34	6,36%		0,00%	12.466,58	0,80%	57.074,81	16,82%	133.468,74	1,92%
Tanah Terbuka	1.049,74	0,09%		0,00%	161,57	0,00%	3.227,82	0,21%	243,23	0,07%	4.682,36	0,07%
Total	1.188.286,26	100,00	24.320,47	100,00	3.843.583,06	100,00	1.555.055,56	100,00	339.262,19	100,00	6.950.507,54	100,00

Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 2.2 Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

F. Potensi Pengembangan Ekonomi Sektoral

1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

- Fokus komoditas tanaman pangan Provinsi Kalimantan Utara adalah padi, jagung, dan ubi kayu. Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan merupakan daerah potensial pengembangan ketiga komoditas tanaman pangan tersebut.
- Provinsi Kalimantan Utara memiliki lahan pertanian yang potensial yaitu dengan luas pada tahun 2018 sebesar 30.443 Ha (lahan sawah) dan 75.075 Ha (lahan kering)
- Jumlah produksi tanaman padi terbesar pada tahun 2018 terdapat di Kab. Bulungan dengan jumlah produksi 34.863 Ton dari total keseluruhan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 73.375 Ton.
- Sedangkan Jumlah produksi tanaman ubi pada tahun 2018 terbesar di Kab. Nunukan dengan jumlah produksi 27.005 Ton dari total Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan sebanyak 37.422 Ton.

2. Sektor Hortikultura

- Jenis tanaman sayur semusim unggulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah cabe rawit, petai, ketimun. Dari data produksi komoditas sayur-sayuran yang memiliki keunggulan kompetitif



adalah ketimun dengan produksi tanaman pada tahun 2018 sebesar 4.796 ton dan luas panen sebesar 299 Ha.

- b. Jenis tanaman buah-buahan semusim unggulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah buah jeruk, durian/lai, papaya, dan pisang. Dari data produksi komoditas buah yang memiliki keunggulan kompetitif adalah buah pisang dengan produksi tanaman pada tahun 2018 sebesar 26.465 ton dengan jumlah tanaman sebesar 390.715 pohon.

3. Sektor Peternakan

- a. Komoditas utama sektor peternakan adalah sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, dan itik.
- b. Jumlah populasi hewan ternak unggas Provinsi Kaltara tahun 2018 sebesar 5.889.154 ekor. Jumlah populasi komoditas terbesar yaitu ayam ras pedaging dan ayam kampung mencapai 99% dari total populasi hewan ternak unggas. Diikuti jumlah hasil populasi ternak itik sebesar 0,45 % dan unggas lainnya sebesar 0,55 %.
- c. Untuk hewan ternak lainnya, pada tahun 2018 populasi babi merupakan yang terbanyak yaitu 30.005 ekor, disusul sapi sebanyak 21.969 ekor, kambing 12.862 ekor dan kerbau sebanyak 3.783 ekor.

4. Sektor Perkebunan

- a. Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain karet, kelapa, kopi, lada, aren, kakao, kelapa sawit, dan lain-lain. Namun yang menjadi komoditas unggulan hanya 4 jenis yaitu kakao dan kelapa (Prioritas I), serta kopi dan kelapa sawit (Prioritas II).
- b. Perkebunan kakao terdapat di semua kabupaten kecuali Kota Tarakan. Pada tahun 2018, luas perkebunan kakao seluas 2.702 ha. Dengan hasil produksi 1.201 Ton, terbesar terdapat di Kabupaten Nunukan mencapai 1.009 Ton.
- c. Pada perkebunan kelapa, pada tahun 2018 luas perkebunan 1.255 ha. Dengan hasil produksi 506 Ton, dan daerah penghasil terbesar terdapat di Kabupaten Nunukan mencapai 307 Ton.
- d. Perkebunan kopi pada tahun 2018 seluas 1.490 ha. Dengan hasil produksi 173 Ton. Daerah penghasil terbesar terdapat di Kabupaten Malinau sebanyak 140 Ton.



- e. Perkebunan kelapa sawit terdapat di semua kabupaten kecuali Kota Tarakan. Pada tahun 2018, luas perkebunan kelapa sawit seluas 35.690 ha. Dengan Hasil produksi 79.485 Ton, terbesar terdapat di Kabupaten Nunukan mencapai 74.854 Ton.

5. Sektor Kehutanan

Dari enam klasifikasi hutan yang ada di Kalimantan, hanya empat jenis yang berada di Kalimantan Utara yaitu Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Wisata, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap. Luas total hutan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016 adalah 5.622.120 Ha.

Tabel 2.7
Luas Hutan (Ha) Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara							
Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Hutan Suaka Alam & Wisata	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Dapat Dikonversi	Jumlah Hutan Tetap	
Malinau	685.856	998.862	1.570.815	364.811	30.474	3650818	
Bulungan	206.717	-	426.369	256.655	5.586	895327	
Nunukan	156.200	269.677	189.061	274.432	13.514	902884	
Tana Tidung	-	-	9.084	154.480	9.520	173084	
Tarakan	6.997	-	-	-	-	6.997	
Provinsi Kalimantan Utara	2016	1.048.780	1.268.539	2.195.329	1.050.378	59.094	5.622.120
	2012	1.130.971	1.695.474	2.076.008	1.325.960		3.401.968
	2011	1.053.531	1.695.474	1.872.556	1.491.065		3.363.621
	2010	1.053.531	1.695.474	1.872.556	1.491.065		3.363.621
	2009	1.053.531	1.695.474	1.872.556	1.491.065		3.363.621
	2008	1.053.531	1.695.474	1.872.556	1.491.065		3.363.621

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2017

6. Sektor Perikanan

- Komoditas utama budidaya perikanan adalah ikan, udang dan rumput laut.
- Tahun 2018 jumlah budidaya perikanan yang terbesar adalah budidaya rumput laut sebesar 580.550 Ton, meningkat dari tahun 2017 sebesar 458.724 Ton.
- Luas lahan budidaya perikanan Provinsi Kaltara Tahun 2018 sebesar 1.340.165.675 m². Daerah dengan luas lahan terbesar adalah kabupaten Bulungan dengan luas sebesar 775.943.404 m²
- Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap laut tahun 2018 Provinsi Kaltara adalah sebesar 27.087 Ton, dengan Tarakan sebagai daerah dengan produksi terbesar yakni sebesar 16.105 Ton.

7. Sektor Industri

Pemerintah pusat telah menetapkan industri unggulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah kakao. Jika dibandingkan dengan data perkebunan yang ada, komoditas kakao dan karet memang memiliki jumlah produksi yang tinggi. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi barang jadi yang



memiliki nilai tambah. Berdasarkan data, industri di bidang agro dan hasil hutan masih lebih kecil dibandingkan dengan industri logam, mesin, elektronika, dan aneka industri. Oleh karena itu, pengembangan industri agro perlu lebih dimaksimalkan. Produk unggulan UMKM di provinsi ini, antara lain meubel rotan, anyaman bambu, anyaman rotan, anyaman manik-manik, kue dan roti, bubuk kopi, pengolahan logam, pembuatan kapal, pengolahan rumput laut, minyak atsiri, beras Adan, ikan teri, udang kering, kerupuk durian, amplang, dan batik.

8. Sektor Pariwisata

Pola pergerakan wisatawan yang menggunakan jalur udara, yaitu melalui: (a) Jakarta-Balikpapan-Tarakan; (b) Yogyakarta-Balikpapan-Tarakan; dan (c) Jakarta-Makassar-Balikpapan-Tarakan. Untuk jalur laut, telah dilengkapi dengan pelabuhan utama yaitu di Pelabuhan Tarakan (Kota Tarakan) dan Pelabuhan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan). Daya tarik wisata di Provinsi Kalimantan Utara, antara lain:

a. Daya tarik wisata *Heart of Borneo (HoB)*.

Heart of Borneo merupakan keunikan untuk menunjukkan keberadaan hutan primer dan sekunder, luas dan tua di Asia Tenggara, yaitu di jantung Kalimantan di Taman Nasional Kayan Mentarang Kabupaten Malinau.

b. Daya tarik wisata kawasan perkotaan Tarakan dan Kesultanan Bulungan.

Tarakan dikenal dengan minyak dan sejarah pendudukan negara Jepang, Kerajaan Bulungan merupakan salah satu kerajaan di Kalimantan Utara.

c. Daya tarik wisata kawasan pesisir kepulauan (Nunukan, Bulungan Kepulauan, dan Tana Tidung Kepulauan)

Nunukan, Bulungan Kepulauan, dan Tana Tidung Kepulauan merupakan wilayah dengan potensi wisata yang beragam mulai dari pantai sampai dengan hutan hujan tropis.

d. Daya tarik wisata kawasan pedalaman (pedalaman Bulungan dan Tana Tidung)

Daya tarik pariwisata ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu daya tarik wisata berbasis alam, wisata berbasis sejarah dan budaya, serta wisata berbasis kehidupan masyarakat yang lebih dominan.

e. Kawasan Perbatasan Negara

Kawasan pengembangan pariwisata perbatasan negara yang ada di Kalimantan Utara, meliputi daerah perbatasan Malinau yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur). Dalam



pengembangan wisata di kawasan ini, didominasi variasi wisata kehidupan masyarakat dan wisata berbasis alam.

Adapun destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Pantai Amal, Wana Wisata Persemaian, Museum Rumah Bundar, Hutan Mangrove Tarakan, Air Terjun Martin Billa, Sungai Nyamuk, Long Bawan (Krayan), Gunung Rian, Batu Mapan, Hutan Lindung Sungai Sesayap, Pantai Kuning/Taman Laut Karang Tigau, dan Museum Kesultanan Bulungan.

G. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 (c-to-c)

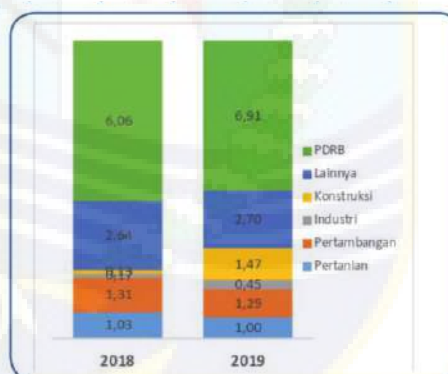
Ekonomi Kalimantan Utara tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 tumbuh 6,91 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 12,02 persen, disusul oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 9,76 persen, lalu Lapangan Usaha Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 9,69 persen.

Gambar 2.3 Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2019 (persen)



Sumber : BPS Prov. Kaltara

Gambar 2.4 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2019 (persen)



Sumber : BPS Prov. Kaltara

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 1,47 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,29 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 1,05 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,00 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,45 persen; Industri Pengolahan sebesar 0,45 persen dan



Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 0,34 persen. Sementara itu lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi kurang dari 0,30 persen.

Struktur perekonomian Kalimantan Utara menurut lapangan usaha tahun 2019 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan Penggalian (26,94 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,88 persen); Konstruksi (13,74 persen), serta Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,00 persen).

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Tahun 2019 terhadap Triwulan IV Tahun 2018 (y-on-y)

Perekonomian Kalimantan Utara triwulan IV tahun 2019 jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,04 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha konstruksi yang tumbuh sebesar 12,02 persen, disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 9,76 persen, lalu lapangan usaha jasa pendidikan yang tumbuh sebesar 9,69 persen.

Menurut sumber pertumbuhannya, ekonomi Kalimantan Utara triwulan IV tahun 2019 jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018 (y-on-y) sebesar 9,15 persen tersebut paling besar disumbang oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 1,52 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 1,20 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,09 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,46 persen; Industri Pengolahan sebesar 0,38 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 0,35 persen. Sementara itu lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi kurang dari 0,30 persen.

Struktur perekonomian Kalimantan Utara menurut lapangan usaha tahun 2019 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan Penggalian (26,94 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,88 persen); Konstruksi (13,74 persen), serta Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,00 persen).

3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan III-Tahun x`x`2019 (q-to-q)

Ekonomi Kalimantan Utara triwulan IV-2019 dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 4,04 persen. Pertumbuhan terutama disebabkan oleh pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,98 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,37 persen; Jasa Kesehatan dan



Kegiatan Sosial sebesar 5,01 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,97 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 4,88 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,76 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,26 persen dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,11 persen. Sedangkan sisanya adalah kontribusi dari lapangan usaha lainnya.

Gambar 2.5
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) [Q1-2014 - Q4-2019] (persen)



Sumber : BPS Prov. Kaltara

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan dan Distribusi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019 (Persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,45	5,95	5,78	16,31	16,03	15,88
B. Pertambangan dan Penggalian	7,13	4,61	4,60	27,37	27,52	26,94
C. Industri Pengolahan	5,54	1,72	4,83	9,98	9,43	9,19
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,79	11,17	5,47	0,05	0,05	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,26	7,27	2,86	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	6,13	7,72	12,02	12,45	12,91	13,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,43	8,88	9,76	11,35	11,67	12,00
H. Transportasi dan Pergudangan	10,83	8,72	7,00	6,99	7,10	7,05
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,99	11,96	7,93	1,57	1,63	1,62
J. Informasi dan Komunikasi	9,58	9,09	8,22	2,29	2,32	2,32
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,03	8,66	5,39	1,15	1,14	1,09
L. Real Estat	4,76	6,27	5,46	0,79	0,78	0,77
M,N. Jasa Perusahaan	3,52	3,80	2,31	0,25	0,23	0,22
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,79	6,08	6,70	5,22	5,04	4,95
P. Jasa Pendidikan	7,53	5,54	9,69	2,48	2,43	2,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,30	5,25	9,07	1,03	1,00	1,01
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7,53	6,54	8,51	0,66	0,65	0,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,80	6,05	6,91	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	7,13	6,44	7,35			
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA BATUBARA	6,84	6,16	7,52			

Sumber : BPS Prov. Kaltara

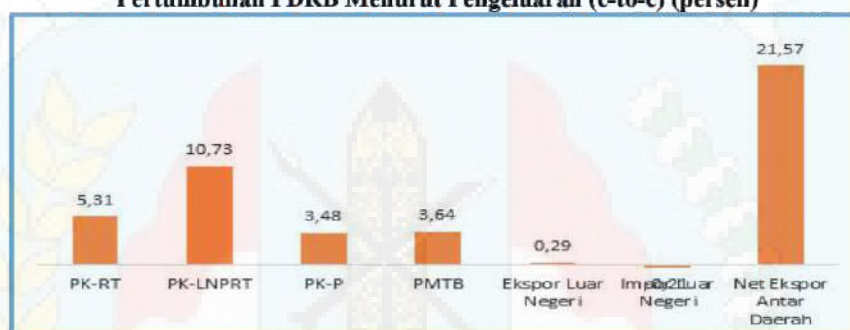


H. PDRB MENURUT PENGELUARAN

1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 (c-to-c)

Pertumbuhan ekonomi kumulatif Kalimantan Utara selama triwulan IV-2019 (c-to-c) tumbuh sebesar 6,91 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen, kecuali Komponen Impor Luar Negeri yang mengalami kontraksi sebesar 0,21. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 21,57 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 10,73 persen, serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,31 persen.

Gambar 2.6
Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (c-to-c) (persen)



Sumber : BPS Prov. Kaltara

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (y-on-y)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 terhadap triwulan IV-2018 (y on-y) mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,04 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 23,15 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 7,51 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,19 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Utara menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan IV-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pembentukan Modal tetap Bruto (31,31 persen). Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Net Ekspor Antar Daerah (27,03 persen); Komponen Ekspor Luar Negeri (17,9 persen); serta Komponen Pengeluaran Konsumsi



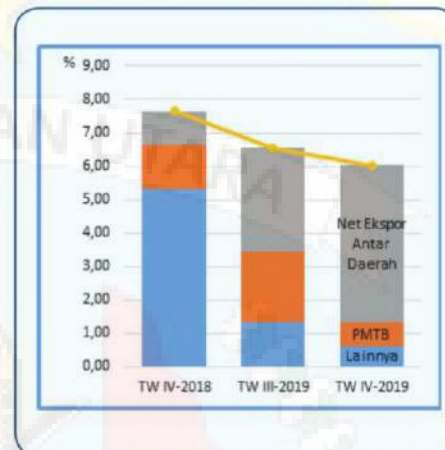
Rumah Tangga (PK-P) (9,29 persen). Sedangkan kontribusi Komponen PK LNPRT dan Komponen Perubahan Inventori relatif kecil, masing-masing sebesar 0,73 persen dan 0,29 persen.

Gambar 2.7
Pertumbuhan Beberapa Komponen
Pengeluaran
Triwulan IV-2019 (y-on-y)



Sumber : BPS Prov. Kaltara

Gambar 2.8
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut
Lapangan Usaha
Tahun 2018 - 2019 (persen)



Sumber : BPS Prov. Kaltara

3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan III-2019 (q-to-q)

Ekonomi Kalimantan Utara triwulan IV-2019 tumbuh sebesar 4,41 persen bila dibandingkan dengan triwulan III-2019 (q-to-q). Pertumbuhan yang terjadi pada triwulan ini didukung oleh peningkatan seluruh komponen, dimana Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) menunjukkan angka pertumbuhan paling tinggi sebesar 18,15 persen.

Gambar 2.9 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen (q-to-q) (persen)



Sumber : BPS Prov. Kaltara



Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)

Lapangan Usaha	Triw IV-2019 Terhadap Triw III-2019	Triw IV-2019 Terhadap Triw IV-2018	Kumulatif Triw IV-2019 Terhadap Kumulatif Triw IV-2018	Sumber Pertumbuhan Triw IV-2019 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,59	4,19	5,31	0,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,36	7,51	10,73	0,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,15	3,26	3,48	0,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,88	2,34	3,64	1,12
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	(0,02)	(2,32)	0,29	0,08
7. Impor Luar Negeri	(2,36)	(11,12)	(0,21)	(0,00)
8. Net Ekspor Antar Daerah	9,41	23,15	21,57	4,54
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,04	6,04	6,91	6,91

Sumber : BPS Prov. Kaltara

Tabel 2.10
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019 (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2019	Triw II-2019	Triw III-2019	Triw IV-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16,75	16,60	16,56	15,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,77	0,76	0,75	0,73
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,82	7,80	7,76	8,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,25	30,86	31,93	31,31
5. Perubahan Inventori	0,31	0,32	0,31	0,29
6. Ekspor Luar Negeri	19,23	18,08	18,70	17,90
7. Impor Luar Negeri	1,92	1,92	2,10	1,99
8. Net Ekspor Antar Daerah	28,79	27,50	26,09	27,03
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Prov. Kaltara

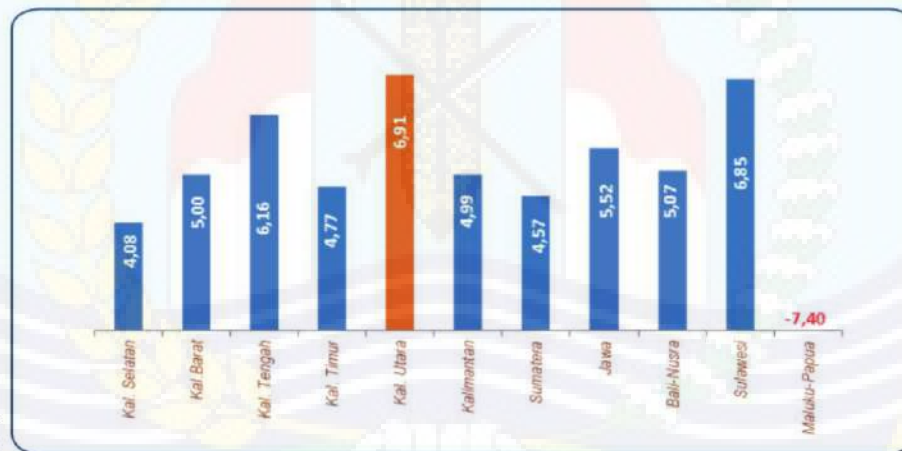


I. PERTUMBUHAN PDRB TRIWULAN IV-2019 MENURUT PROVINSI SE- KALIMANTAN DAN WILAYAH LAINNYA

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,81 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 21,33 persen, Pulau Kalimantan 8,04 persen, Pulau Sulawesi 6,42 persen, dan sisanya 5,4 persen di pulau-pulau lainnya.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 (y-to-y) tumbuh pada kisaran diatas 5 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi di seluruh pulau di Indonesia. Pertumbuhan tertinggi terjadi di pulau Sulawesi sebesar 6,42 persen; kemudian Pulau Kalimantan sebesar 4,99 persen; Pulau Jawa sebesar 5,52 persen; Bali-Nusra sebesar 5,07 persen dan Pulau Sumatra sebesar 4,57

Gambar 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Se-Kalimantan dan Kawasan Indonesia Triwulan IV-2019
(persen)



Sumber : BPS Prov. Kaltara

J. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, MARET – SEPTEMBER 2019

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada September 2019 sebesar 48,61 ribu (6,49 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 48,78 ribu (6,63 persen), jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 0,2 ribu orang atau berkurang 0,14 persen.



Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan mengalami penurunan baik secara absolut maupun persentase, namun penduduk daerah pedesaan mengalami kenaikan secara absolut dan secara persentase mengalami penurunan. Selama periode Maret 2019 – September 2019, penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,8 ribu orang dari 22,88 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 22,06 ribu orang pada September 2019 atau secara persentase turun sebesar 0,24 persen dari 5,10 persen menjadi 4,86 persen. Penduduk Miskin di daerah pedesaan mengalami kenaikan sebanyak 0,7 ribu orang dari 25,90 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 26,55 ribu orang pada September 2019 atau secara persentase turun 0,02 persen dari 9,02 persen menjadi 9,00 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan masih lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Persentase penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan pada bulan September 2019 sebesar 9,00 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,86 persen. Pola ini sama dengan kondisi Maret 2019 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,10 persen sedangkan di pedesaan lebih tinggi 9,02 persen.

Tabel 2.11
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Utara
Menurut Daerah, Maret 2019 – September 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2019	22,88	25,90	48,78	5,10	9,02	6,63
September 2019	22,06	26,55	48,61	4,86	9,00	6,49

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2019 dan September 2019



BAB III KUANTITAS PENDUDUK

A. Persebaran (Distribusi) Penduduk

Kuantitas Penduduk diartikan sebagai jumlah penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan penduduk). Bab ini juga akan membahas komposisi penduduk berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk serta penduduk menurut karakteristik demografi. Tabel dan gambar di bab ini bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI yang diolah dan OPD terkait.

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi Penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Apakah penyebarannya merata atau tidak, dapat dilihat dari jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 sebesar 658.535 jiwa, terdiri dari 345.265 Jiwa Laki-laki dan 313.270 jiwa Perempuan, serta memiliki luas wilayah keseluruhan ± 75.469 Km². Jumlah penduduk perkabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat berikut ini :¹

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

N O	NAMA WILAYAH	JENIS KELAMIN		PENDUDUK	JUMLAH KECAMATAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	BULUNGAN	74.232	66.295	140.527	10
2	MALINAU	42.512	38.310	80.822	15
3	NUNUKAN	95.936	86.092	182.028	19
4	TANA TIDUNG	12.661	11.484	24.145	5
5	KOTA TARAKAN	119.924	111.089	231.013	4
	KALIMANTAN UTARA	345.265	313.270	658.535	53

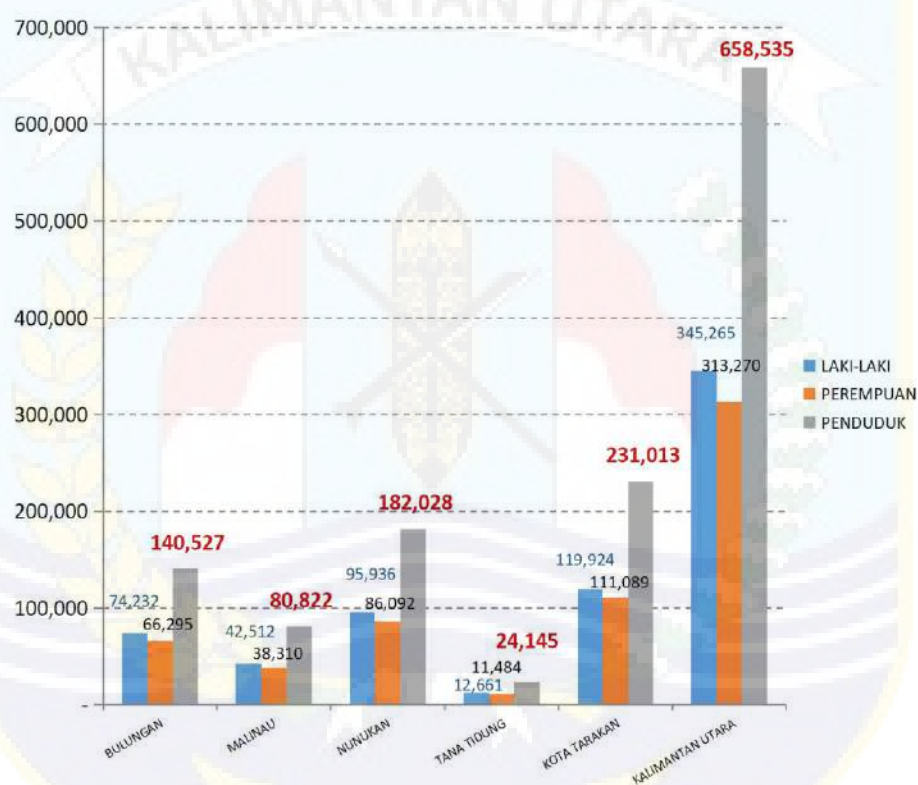
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Tarakan merupakan Kota dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 231.013 jiwa (35,08% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara), diikuti Kabupaten Nunukan 182.028 jiwa (27,64% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara), Kabupaten Bulungan 140.527 jiwa (21,34% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara),

¹ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Data Konsolidasi Bersih (DKB) Per Desember Tahun 2019



Kabupaten Malinau 80.822 jiwa (12,27% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara) dan Kabupaten Tana Tidung adalah wilayah dengan jumlah penduduk terkecil dengan jumlah penduduk sebesar 24.145 jiwa (3,67% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Utara). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.1 Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2019



Adapun jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan jenis kelamin tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini : ²

Catatan : Nama kecamatan yang dicetak tebal dan miring adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

² Biro Pengelola Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018



Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

Kabupaten Bulungan				
KDKEC	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
650101	TANJUNG PALAS	8.838	8.050	16.888
650102	TANJUNG PALAS BARAT	3.539	2.927	6.466
650103	TANJUNG PALAS UTARA	5.483	4.968	10.451
650104	TANJUNG PALAS TIMUR	7.904	6.694	14.598
650105	TANJUNG SELOR	27.595	25.151	52.746
650106	TANJUNG PALAS TENGAH	5.734	5.165	10.899
650107	PESO	2.168	1.878	4.046
650108	PESO ILIR	2.087	1.761	3.848
650109	SEKATAK	4.711	4.270	8.981
650110	BUNYU	6.173	5.431	11.604
TOTAL		74.232	66.295	140.527

Kabupaten Malinau				
KDKEC	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
650201	MENTARANG	3.069	2.919	5.988
650202	MALINAU KOTA	13.019	11.990	25.009
650203	PUJUNGAN	1.009	909	1.918
650204	KAYAN HILIR	865	708	1.573
650205	KAYAN HULU	1.318	1.191	2.509
650206	MALINAU SELATAN	2.474	2.106	4.580
650207	MALINAU UTARA	7.769	6.879	14.648
650208	MALINAU BARAT	5.895	5.360	11.255
650209	SUNGAI BOH	1.320	1.164	2.484
650210	KAYAN SELATAN	1.013	973	1.986
650211	BAHAU HULU	779	635	1.414
650212	MENTARANG HULU	560	507	1.067
650213	MALINAU SELATAN HILIR	1.589	1.391	2.980
650214	MALINAU SELATAN HULU	1.353	1.157	2.510
650215	SUNGAI TUBU	480	421	901
TOTAL		42.512	38.310	80.822



Kabupaten Nunukan				
KDKEC	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
650301	SEBATIK	3.280	2.943	6.223
650302	NUNUKAN	31.962	29.073	61.035
650303	SEMPAKUNG	3.169	2.892	6.061
650304	LUMBIS	3.275	2.905	6.180
650305	KRAYAN	1.705	1.540	3.245
650306	SEBUKU	5.202	4.387	9.589
650307	KRAYAN SELATAN	711	648	1.359
650308	SEBATIK BARAT	5.180	4.829	10.009
650309	NUNUKAN SELATAN	10.288	9.425	19.713
650310	SEBATIK TIMUR	6.840	6.588	13.428
650311	SEBATIK UTARA	3.760	3.606	7.366
650312	SEBATIK TENGAH	4.017	3.628	7.645
650313	SEI MENGGARIS	5.017	3.961	8.978
650314	TULIN ONSOI	4.672	3.740	8.412
650315	LUMBIS OGONG	2.620	2.324	4.944
650316	SEMPAKUNG ATULAI	1.380	1.239	2.619
650317	KRAYAN TENGAH	576	446	1.022
650318	KRAYAN TIMUR	778	639	1.417
650319	KRAYAN BARAT	1.504	1.279	2.783
TOTAL		95.936	86.092	182.028

Kabupaten Tana Tidung				
KDKEC	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
650401	SESAYAP	5.234	4.837	10.071
650402	SESAYAP HILIR	3.487	3.125	6.612
650403	TANA LIA	1.737	1.487	3.224
650404	BETAYAU	1.428	1.308	2.736
650405	MURUK RIAN	775	727	1.502
TOTAL		12.661	11.484	24.145

Kota Tarakan				
KDKEC	KECAMATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
657101	TARAKAN BARAT	40.700	37.890	78.590
657102	TARAKAN TENGAH	35.473	32.928	68.401
657103	TARAKAN TIMUR	28.003	26.014	54.017
657104	TARAKAN UTARA	15.748	14.257	30.005
TOTAL		119.924	111.089	231.013



2. Penduduk Di Wilayah Perbatasan

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.³

Jumlah rasio penduduk di kawasan perbatasan adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 3.3 Rasio Penduduk Perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

Kabupaten	Penduduk Perbatasan	Jumlah Penduduk	Rasio Kabupaten	Rasio Provinsi
Nunukan	157.579	182.028	86,57	24,06
Malinau	9.400	80.822	11,63	1,44
Jumlah	166.979	262.850	63,53	25,36

Dari tabel di atas, apabila kita fokuskan pada kecamatan-kecamatan yang memiliki wilayah perbatasan, kita akan memperoleh data sebagai berikut : jumlah penduduk Kabupaten Nunukan di wilayah perbatasan adalah 157.579 dari jumlah seluruh penduduk Nunukan, yaitu 182.028 jiwa. Sedangkan Kabupaten Malinau memiliki penduduk di kawasan perbatasan 9.400 dari jumlah seluruh penduduk Malinau 80.822 jiwa. Artinya, 86,57% penduduk Kabupaten Nunukan mendiami wilayah perbatasan, sedangkan penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 11,63% mendiami wilayah perbatasan. Rasio keseluruhan penduduk yang bertempat tinggal di perbatasan terhadap jumlah penduduk se-Kalimantan Utara adalah 25,36%.

Angka 25,36% adalah jumlah besar penduduk perbatasan yang sangat potensial. Keadaan nyata penduduk di wilayah-wilayah perbatasan yang terpencil ini menyadarkan kita bahwa kependudukan bukanlah sekedar angka-angka kuantitatif saja. Mereka adalah "patok hidup" di wilayah perbatasan. Patok hidup adalah ungkapan yang menggambarkan semangat nasionalisme dan patriotisme mereka dalam membela dan memihak NKRI daripada Malaysia.⁴ Mereka lah sebenarnya patok hidup penjaga wilayah perbatasan, sehingga kehadiran negara

³ Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6, kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

⁴ Fakta ini banyak kami jumpai setelah beberapa kali melakukan pelayanan kependudukan di wilayah-wilayah tersebut, terutama daerah-daerah yang pernah menjadi medan pertempuran perang Dwikora. Melalui wawancara informal, kami mendengar cerita-cerita menarik tentang heroisme dan semangat para veteran saat mempertahankan jengkal demi jengkal kedaulatan Indonesia kala itu. Rasa bangga dan heroisme itu mereka tunjukkan dengan memperlihatkan sertifikat-sertifikat, piagam-piagam, dan seragam-seragam mereka yang sudah nampak lusuh disertai cerita mereka saat berlingkup dari bom dan desingan senapan musuh.



adalah wajib untuk melindungi mereka dengan cara memberikan pelayanan dokumen-dokumen administrasi kependudukan. Dokumen-dokumen ini penting sebagai kunci akses bagi pelayanan-pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sebagai bukti administratif bahwa mereka berstatus sebagai WNI.

Fakta bahwa banyak penduduk perbatasan yang mencari pekerjaan dan membeli kebutuhan pokok ke Malaysia tidak bisa dijadikan justifikasi bahwa nasionalisme mereka untuk Malaysia. Itu adalah pilihan logis ketika infrastruktur dan ketersediaan pangan lebih mudah dijangkau di negara tetangga. Mereka tidak mungkin menunggu distribusi makanan dan bahan-bahan lainnya dari pemerintah daerah atau penyedia setempat, sementara untuk menjangkau pusat pemerintahan kabupaten atau kota setempat saja harus ditempuh dengan pesawat atau perahu, karena nyaris mustahil ditempuh lewat jalur darat.

3. Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan banyaknya penduduk terhadap luas wilayah suatu daerah. Sedangkan masalah kepadatan penduduk seringkali ikut hadir pada suatu wilayah / daerah yang sedang mengurban (urbanisasi). Urbanisasi disini tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, namun juga proses perubahan suatu wilayah yang sebelumnya sepi menjadi ramai dari segi jumlah penduduk dan bertambahnya infrastruktur fisik maupun fasilitas publik. Dengan mengetahui kepadatan penduduk maka dapat diketahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta dapat digunakan sebagai acuan untuk mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (Program Transmigrasi).

Secara umum, permasalahan-permasalahan akibat kepadatan penduduk di Indonesia berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas terlihat dari kemampuan dan daya saing Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalimantan Utara sebagai provinsi baru yang berusia 6 (enam) tahun, saat ini belum mengalami ledakan jumlah penduduk sehingga masih banyak waktu untuk menata ruang dan wilayahnya.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara tercatat seluas 75.469 Km² atau 14% dari luas Pulau Kalimantan yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan, baik di Kabupaten atau Kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di Kota Tarakan diikuti Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten



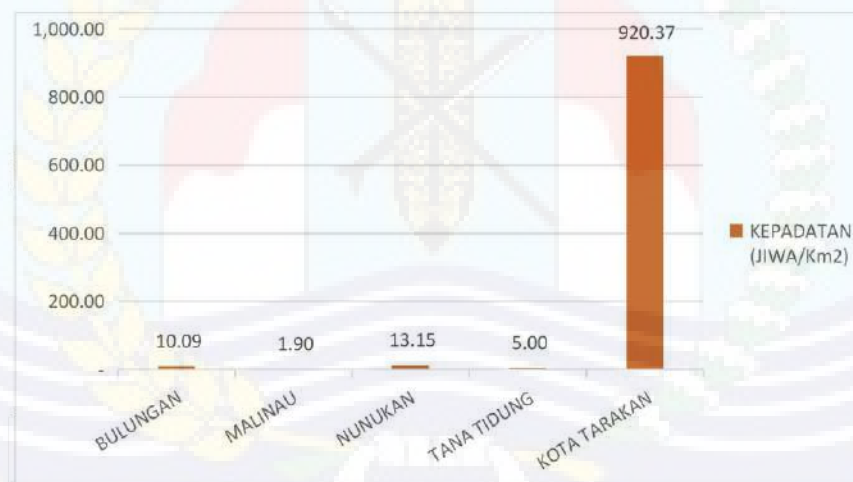
Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau. Data kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁵

Tabel 3.4 Rasio Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

N O	NAMA WILAYAH	PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN
		(JIWA)	(Km2)	(JIWA/Km2)
1	BULUNGAN	140.527	13.926	10,09
2	MALINAU	80.822	42.621	1,90
3	NUNUKAN	182.028	13.842	13,15
4	TANA TIDUNG	24.145	4.829	5,00
5	KOTA TARAKAN	231.013	251	920,37
TOTAL		658.535	75.469	8,73

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3.2 Grafik Rasio Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019



Jika dilihat persebaran di setiap wilayah nampak bahwa kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,73 Jiwa/Km². Kota Tarakan merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 920,37 Jiwa/Km².

Padatnya Kota Tarakan disebabkan oleh posisinya sebagai kota administratif, kota industri dan kota perdagangan, sehingga perputaran ekonomi lebih dinamis di wilayah ini. Kondisi ini menjadikannya daya tarik bagi para pendatang dan penduduk lainnya untuk bekerja dan bertempat tinggal di Kota Tarakan.

⁵ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



Wilayah terpadat kedua adalah Kabupaten Nunukan dengan kepadatan sebesar 13,15 Jiwa/Km². Nunukan menjadi padat penduduk karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Nunukan menjadi pintu gerbang perpindahan penduduk dan perdagangan antara dua negara. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu Kabupaten Malinau dengan tingkat kepadatan sebesar 1,90 Jiwa/Km² karena hampir besar wilayah Kabupaten Malinau adalah kawasan hutan konservasi yang tidak memungkinkan untuk dihuni.

Dengan perbedaan kepadatan penduduk per wilayah kabupaten/kota yang cukup mencolok tersebut, maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara sangat perlu menata dan mengatur persebaran penduduk, tata ruang, pendayagunaan lahan dan peningkatan lapangan kerja yang akan mengendalikan mobilisasi penduduk secara alami.

4. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu, sehingga dapat diketahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

Laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi kependudukan suatu daerah di masa kini maupun di masa depan. Secara umum pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor alami yaitu kelahiran dan kematian, dan faktor non alami yaitu migrasi (perpindahan penduduk).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara adalah 648.407 jiwa dan jumlah penduduk di tahun 2019 adalah 658.535 jiwa.

Dengan demikian perubahan jumlah penduduk yang berasal dari kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk adalah 10.128 jiwa dan pertumbuhan penduduk sebesar 1.56 %. Berikut pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2019 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :⁶

⁶ Ibid

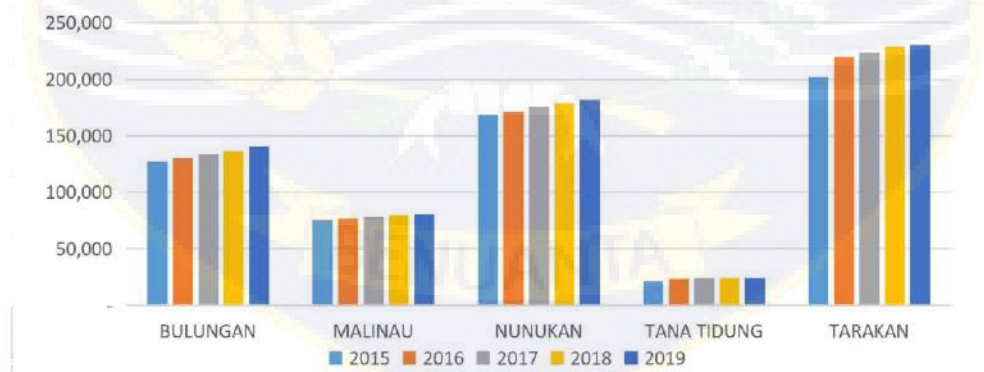


Tabel 3.5 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2019

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
		2018	2019	
1	BULUNGAN	136.619	140.527	2,86
2	MALINAU	79.903	80.822	1,15
3	NUNUKAN	178.975	182.028	1,71
4	TANA TIDUNG	24.190	24.145	-0,19
5	TARAKAN	228.720	231.013	1,00
Total		648.407	658.535	1,56

Dari tabel diatas terlihat bahwa laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 adalah 1,56%.⁷ Jika dibandingkan dengan tahun 2018,⁸ nampak terjadi penurunan persentase 0,45%. Tahun 2019 Kabupaten Bulungan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk 2,86% naik persentase 0,61% dari tahun 2018 2,25%. Tahun 2019 Kabupaten Malinau mengalami pertumbuhan jumlah penduduk 1,15% turun persentase 1,10% dari tahun 2018 2,25%. Tahun 2019 Kabupaten Nunukan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,71% turun persentase 0,01% dari tahun 2018 1,72%. Tahun 2019 Kabupaten Tana Tidung mengalami penurunan pertumbuhan jumlah penduduk -0,19%, satu-satunya yang mengalami penurunan, turun persentase 1,87% dari tahun 2018.⁹ Tahun 2019 Kota Tarakan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,00% turun persentase 1,03% dari tahun 2018 2,03%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3.3 Grafik Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten/Kota Utara se-Provinsi Kalimantan Tahun 2015-2019



⁷ Ibid

⁸ Pertumbuhan penduduk Kaltara 2017-2018 adalah 2,01%. Sumber: Tim, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018*, (Tanjung Selor : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, 2019), hlm. 40.

⁹ Pada periode 2017-2018, pertumbuhan penduduk Kab Tana Tidung adalah 1,68%, *Loc.cit.*



Diperkirakan, untuk beberapa tahun ke depan, Kabupaten Bulungan tetap akan mengalami peningkatan tren pertumbuhan penduduk tertinggi, dikarenakan Kabupaten Bulungan sebagai tempat ibukota Provinsi Kalimantan Utara berada yaitu Kecamatan Tanjung Selor, yang direncanakan akan menjadi kota mandiri. Dan diprediksi Kota Tarakan akan juga mengalami peningkatan tren pertumbuhan penduduk karena sebagai kota administratif, kota industri, kota perdagangan, juga merupakan pintu masuk terbesar menuju Kalimantan Utara melalui Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan.

B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Demografi adalah ilmu kependudukan yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis demografi merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Indikator penduduk menurut karakter demografi dapat dilihat dari usia dan jenis kelamin, status perkawinan, keluarga, pendidikan, agama, kecacatan, kelahiran dan kematian.

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk menurut kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan.

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan pekerjaan dan lain-lain.

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan.

Data penduduk ini juga sangat vital jika dikaitkan dengan program-program yang digalakkan pemerintah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tergambar dalam tabel berikut :¹⁰

¹⁰ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2019

KELOMP UMUR	JENIS KELAMIN (JIWA)				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PENDUDUK	
	n	%	n	%	n	%
75 >	3.535	1,02	2.922	0,93	6.457	0,98
70-74	3.404	0,99	3.057	0,98	6.461	0,98
65-69	6.308	1,83	4.679	1,49	10.987	1,67
60-64	8.986	2,60	7.495	2,39	16.481	2,50
55-59	12.713	3,68	10.800	3,45	23.513	3,57
50-54	18.406	5,33	15.326	4,89	33.732	5,12
45-49	23.033	6,67	19.694	6,29	42.727	6,49
40-44	27.287	7,90	23.866	7,62	51.153	7,77
35-39	30.133	8,73	27.704	8,84	57.837	8,78
30-34	28.237	8,18	26.829	8,56	55.066	8,36
25-29	28.901	8,37	26.660	8,51	55.561	8,44
20-24	29.748	8,62	27.747	8,86	57.495	8,73
15-19	27.861	8,07	26.586	8,49	54.447	8,27
10-14	33.250	9,63	30.896	9,86	64.146	9,74
05-09	34.973	10,13	32.649	10,42	67.622	10,27
00-04	28.490	8,25	26.360	8,41	54.850	8,33
TOTAL	345.265	100	313.270	100	658.535	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada kelompok umur 05-09 tahun merupakan jumlah terbanyak dengan persentase sebesar 10,27% dan ini ada pada kelompok jenis kelamin laki-laki (10,13%) maupun perempuan (10,42%). Penduduk terbanyak kedua pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 9,74% dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara. Kedua persentase terbesar ini merupakan usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama. Kondisi ini menuntut perhatian pemerintah provinsi Kalimantan Utara dalam penanganan kelompok penduduk usia ini karena menurut prediksi saat ini Indonesia sedang berada pada fase awal bonus demografi dimana puncaknya berada pada tahun 2028-2030. Bonus Demografi merupakan kondisi dimana suatu wilayah atau negara memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif.¹¹

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar bonus demografi yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dengan adanya

¹¹ Disebut sebagai "bonus" karena kondisi ini tidak terjadi secara terus menerus melainkan hanya terjadi sekali dan tidak bertahan lama. Bonus demografi terjadi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih)



masyarakat yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara apabila ada kesempatan kerja yang produktif. Kedua, terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi karena dengan banyak dibutuhkannya tenaga kerja, maka pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat pesat. Ketiga, meningkatkan tabungan di tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha yang akan memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga angka pengangguran menurun. Terakhir, peran perempuan yang masuk ke dalam pasar kerja akan membantu peningkatan pendapatan dan akan lebih banyak lagi penduduk usia produktif menjadi benar-benar produktif.

2. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu, yang dinyatakan dalam berapa banyaknya penduduk pria berbanding 100 orang wanita. Jika *sex ratio* diatas 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, sedangkan bila *sex ratio*nya kurang dari 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan sumber daya manusia laki-laki dan perempuan secara adil. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh masyarakat termasuk institusi partai politik, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen/legislatif.

Komposisi jumlah penduduk yang berimbang dan partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dari rasio jenis kelamin ini, diharapkan penentu kebijakan di level pusat dan daerah dapat membuat legislasi secara adil dan tidak bias gender. Dengan jumlah penduduk yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan, maka sangat dibutuhkan peran aktif kedua belah pihak di berbagai bidang pembangunan, sehingga dapat dirasakan kesetaraan gender yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan pembangunan yang adil dan makmur. Data penduduk berdasarkan kelompok umur dan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Provinsi Kalimantan Utara selengkapnya pada tabel berikut ¹²:

¹² Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



Tabel 3.7 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

NO	NAMA WILAYAH	JENIS KELAMIN		PENDUDUK	RJK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	BULUNGAN	74.232	66.295	140.527	111,97
2	MALINAU	42.512	38.310	80.822	110,97
3	NUNUKAN	95.936	86.092	182.028	111,43
4	TANA TIDUNG	12.661	11.484	24.145	110,25
5	KOTA TARAKAN	119.924	111.089	231.013	107,95
	TOTAL	345.265	313.270	658.535	110,21

Dari tabel di atas nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Provinsi Kalimantan Utara adalah 110,21 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 110 orang penduduk laki-laki. Jika dilihat per kabupaten/kota pada tabel, terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di setiap Kabupaten/Kota di atas 100, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di setiap Kabupaten/Kota lebih banyak daripada perempuan.

Jika diamati masing-masing wilayah Kabupaten/Kota, maka terlihat bahwa Kabupaten Bulungan memiliki rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 111,97 diikuti Kabupaten Nunukan sebesar 111,43; Kabupaten Malinau sebesar 110,97; Kabupaten Tana Tidung 110,25; sedangkan rasio jenis kelamin terendah adalah Kota Tarakan 107,95. Apabila data rasio jenis kelamin ini disajikan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti berikut ini :

Gambar 3.4 Grafik Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara per Kabupaten/Kota Tahun 2019





3. Piramida Penduduk

Piramida Penduduk adalah grafik mendatar atau diagram batang yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah suatu penduduk. Piramida penduduk disajikan dalam dua buah grafik batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Untuk laki-laki digambarkan di sisi kanan dan untuk perempuan di sisi kiri.

Piramida penduduk ini mengandung beberapa informasi, yaitu:

- 1) Jumlah angka kelahiran semakin bertumbuh sehingga jumlah penduduk juga bertambah;
- 2) Rasio perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan;
- 3) Penggolongan penduduk berdasarkan usia secara berkala;
- 4) Jumlah usia produktif dan non-produktif;
- 5) Jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan;
- 6) Kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk penduduk;
- 7) Perkiraan jumlah kelahiran di masa depan;
- 8) Perkiraan jumlah kematian yang akan terjadi, dsb.

Berikut gambaran piramida penduduk Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin :¹³

Gambar 3.5 Grafik Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur Kalimantan Utara Tahun 2019



¹³ Ibid.



Piramida penduduk Provinsi Kalimantan utara tahun 2019 berdasarkan komposisi penduduk umur dan jenis kelamin menunjukkan ciri *Expansive* yang artinya sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan umur produktif dibandingkan kelompok umur di atasnya dan *Rapid Growth* yang artinya persentase penduduk umur muda yang besar. Pada piramida penduduk di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida lebih kecil dari kelompok umur di atasnya yang berarti usia 0-4 tahun atau balita lebih sedikit daripada usia 5-9 tahun, dst. Jumlah terbesar adalah penduduk 5-9 tahun, yang berarti dibutuhkan perhatian lebih untuk mengakomodir pemenuhan segala kebutuhan penduduk kelompok umur ini contohnya penyediaan sekolah dasar di sektor pendidikan.

Jumlah penduduk pada kelompok usia 20-24 tahun dan kelompok usia 35-39 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar pada kelompok usia produktif (usia 15-64). Penduduk lansia (60 tahun ke atas) menunjukkan proporsi yang kecil, namun di masa depan proporsi penduduk lansia diperkirakan akan terus merambat naik, karena pertambahan umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus bertambah di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan yang baik di berbagai bidang seperti kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Selanjutnya ukuran untuk menyatakan "tua-muda" suatu penduduk dapat dilihat dari umur median penduduk tersebut. Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk tepat menjadi dua bagian yang sama jumlahnya, bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada umur median. Umur median digunakan untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Penduduk Kalimantan Utara termasuk dalam kategori penduduk *Intermediate*. Setelah dihitung umur median penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 adalah 27,26 tahun, yang berarti setengah penduduk Kalimantan Utara pada tahun 2019 berusia di bawah 27 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 27 tahun.¹⁴ Dengan kata lain, penduduk Provinsi Kalimantan utara dikategorikan sebagai penduduk dewasa (*intermediate*).¹⁵

¹⁴ Dibandingkan dengan tahun 2018, umur median penduduk Kalimantan Utara adalah 26,68 tahun, di tahun 2019 lebih tua 0,40 tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, *Op.cit.*, hlm. 48

¹⁵ Suatu penduduk disebut sebagai "penduduk tua" jika umur median dari penduduk tersebut adalah 30 tahun ke atas. Jika umur mediannya antara 20-29 tahun maka disebut "penduduk dewasa" (*intermediate*). Dan jika umur mediannya dibawah 20 tahun maka disebut sebagai "penduduk muda".



4. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator kasar yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dan usia non-produktif (umur 0-14 tahun ditambah umur 65 tahun ke atas). Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk non-produktif. Sebaliknya semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok produktif untuk menanggung penduduk usia belum produktif dan atau tidak produktif. Data kependudukan menurut kelompok produktif dan jenis kelamin Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :¹⁶

Tabel 3.8 Penduduk Usia Produktif Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN (JIWA)				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PENDUDUK	
	n	%	n	%	n	%
65 >	13.247	3,84	10.658	3,40	23.905	3,63
15-64	235.305	68,15	212.707	67,90	448.012	68,03
< 14	96.713	28,01	89.905	28,70	186.618	28,34
TOTAL	345.265	100	313.270	100	658.535	100,00

Jika melihat tabel di atas dapat dianalisa bahwa hampir tiga perempatnya merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun yang berjumlah 448.012 jiwa (68,03 %). Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki dan perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 15-64 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar penduduk merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) yang berpotensi sebagai modal pembangunan dan sisanya sebanyak 186.618 jiwa (28,34 %) merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) serta 23.905 jiwa (3,63 %) merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Penduduk usia kurang dari 15 tahun harus mendapat perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi tenaga kerja baru yang memerlukan *skill* dan kualitas SDM yang memadai. Karena itu diperlukan dukungan sektor pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas yang

¹⁶ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



baik serta lingkungan yang mendukung serta menyebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Sehingga ketika mereka memasuki dunia kerja, mampu menjadi tenaga kerja yang profesional.

Di sisi lain, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sejak dini harus mendorong sebuah kebijakan agar masyarakat mampu mendapatkan asupan gizi yang baik, sarana prasarana pendidikan yang memadai serta lingkungan yang ramah anak, baik di rumah di sekolah maupun di tempat umum, menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan lebih berkualitas.

Jika melihat struktur umur penduduk Kalimantan Utara, maka rasio ketergantungannya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DR = \frac{\text{Jumlah usia nonproduktif}}{\text{Usia produktif}} \times 100$$
$$DR = \frac{186.618 + 23.905}{448.012} \times 100$$
$$= 46,99$$

Hitungan diatas menunjukkan rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 46,99 Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tanggungan sekitar 46-47 penduduk usia non produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rinci berikut :¹⁷

Tabel 3.9 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

KABUPATEN/KOTA	USIA PRODUKTIF (15-64)	USIA NON PRODUKTIF			RASIO KETERGANTUNGAN
		< 15	65 >	TOTAL	
BULUNGAN	95.650	38.788	6.089	44.877	46,92
MALINAU	54.397	23.479	2.946	26.425	48,58
NUNUKAN	122.969	52.719	6.340	59.059	48,03
TANA TIDUNG	16.037	7.349	759	8.108	50,56
TARAKAN	158.959	64.283	7.771	72.054	45,33
TOTAL	448.012	186.618	23.905	210.523	46,99

¹⁷ Ibid.



5. Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

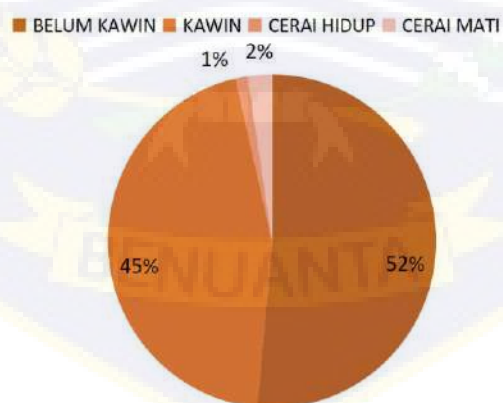
Jumlah penduduk jika dilihat menurut status perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut ini :¹⁸

Tabel 3.10 Status Perkawinan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE (%)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
BELUM KAWIN	190.335	148.579	338.914	51,46
KAWIN	148.860	147.452	296.312	45,00
CERAI HIDUP	3.073	4.694	7.767	1,18
CERAI MATI	2.997	12.545	15.542	2,36
TOTAL	345.265	313.270	658.535	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Utara didominasi penduduk berstatus Belum Kawin sebanyak 51,46%. Jika dilihat menurut Jenis kelamin terlihat bahwa proporsi penduduk laki-laki yang belum kawin lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan yang belum kawin. Hal ini dapat disebabkan karena laki-laki cenderung meneruskan pendidikan dan / atau baru mulai bekerja untuk dapat membiayai pernikahannya sehingga menunda perkawinan dan juga dapat disebabkan laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala rumah tangga berkeinginan untuk hidup mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga demi memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar 3.6 Diagram Status Perkawinan Penduduk -Kalimantan Utara Tahun 2019



Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Pada beberapa kasus hal ini dapat disebabkan karena

¹⁸ Ibid.



perempuan memiliki lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali khususnya pada perempuan yang mandiri secara ekonomi sehingga menunda perkawinan kembali, dapat pula disebabkan masih adanya trauma dari perkawinan sebelumnya. Untuk data Status Perkawinan Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 dapat dilihat di tabel berikut :¹⁹

Tabel 3.11 Status Perkawinan Per Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2019

KABUPATEN / KOTA	STATUS PERKAWINAN								TOTAL	
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
BULUNGAN	68.772	10	66.420	10	1.795	0	3.540	1	140.527	21
MALINAU	44.589	7	34.118	5	416	0	1.699	0	80.822	12
NUNUKAN	94.592	14	81.868	12	1.625	0	3.943	1	182.028	28
TANA TIDUNG	12.554	2	10.912	2	223	0	456	0	24.145	4
TARAKAN	118.407	18	102.994	16	3.708	1	5.904	1	231.013	35
TOTAL	338.914	51	296.312	45	7.767	1	15.542	2	658.535	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara status perkawinan didominasi oleh status belum kawin sebesar 51%. Dan untuk semua status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati) angka tertinggi ada di Kota Tarakan disusul Kabupaten Nunukan.

C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diselesaikan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga *attitude* (sikap perilaku/kepribadian), karena kepribadian dapat mencerminkan etos kerja dan untuk meningkatkan kepribadian membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan keterampilan dapat ditingkatkan melalui bimbingan dan pelatihan.

Tamat belajar/pendidikan didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Jenjang pendidikan tertinggi merupakan jenjang atau kelas pendidikan tertinggi yang pernah diselesaikan oleh seseorang. Pemerintah Kalimantan Utara perlu memperhatikan kondisi saat ini

¹⁹ Ibid.



mengingat bahwa era revolusi industri 4.0 telah berlangsung dan persaingan yang ketat untuk memperoleh pekerjaan di Indonesia.

Perlunya peningkatan pendidikan misalnya program 1 Sarjana 1 KK untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap pekerjaan baik menciptakan lapangan pekerjaan maupun sebagai tenaga kerja yang berkualitas, penilaian terhadap kemampuan diri yang dikaitkan dengan masalah pekerjaan, perencanaan pekerjaan, pengambilan keputusan dalam pemilihan pekerjaan. Peningkatan akses kependidikan yang merata terutama untuk penduduk perbatasan, 3T (tertinggal, terpendil, terluar) serta ekonomi menengah kebawah perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus. Untuk data penduduk menurut pendidikan dan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :²⁰

Tabel 3.12 Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN (JIWA)				JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE (%)
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n	%	n	%		
TIDAK / BELUM SEKOLAH	90.220	13,70	86.139	13,08	176.359	26,78
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	49.789	7,56	46.300	7,03	96.089	14,59
TAMAT SD/SEDERAJAT	63.496	9,64	59.387	9,02	122.883	18,66
SLTP/SEDERAJAT	45.201	6,86	41.465	6,30	86.666	13,16
SLTA/SEDERAJAT	74.742	11,35	57.974	8,80	132.716	20,15
DIPLOMA I / II	1.397	0,21	1.572	0,24	2.969	0,45
AKADEMI / D-III / S. MUDA	3.708	0,56	5.993	0,91	9.701	1,47
DIPLOMA IV / STRATA I	15.356	2,33	13.918	2,11	29.274	4,45
STRATA II	1.307	0,20	508	0,08	1.815	0,28
STRATA III	49	0,01	14	0,00	63	0,01
TOTAL	345.265	52	313.270	48	658.535	100

Tabel 3.13 Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2019

PENDIDIKAN	KABUPATEN / KOTA					TOTAL
	BULUNGAN	MALINAU	NUNUKAN	TANA TIDUNG	TARAKAN	
TIDAK / BELUM SEKOLAH	41.224	20.025	47.535	7.893	59.682	176.359
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	19.701	15.272	31.043	3.644	26.429	96.089
TAMAT SD/SEDERAJAT	26.216	11.821	43.828	3.881	37.137	122.883
SLTP/SEDERAJAT	17.398	9.666	22.439	2.697	34.466	86.666
SLTA/SEDERAJAT	25.288	16.570	28.440	3.677	58.741	132.716
DIPLOMA I / II	730	414	795	191	839	2.969
AKADEMI / D-III / S. MUDA	2.010	1.846	1.850	608	3.387	9.701
DIPLOMA IV / STRATA I	7.470	4.862	5.853	1.491	9.598	29.274
STRATA II	477	335	241	61	701	1.815
STRATA III	13	11	4	2	33	63
TOTAL	140.527	80.822	182.028	24.145	231.013	658.535

²⁰ Ibid.



Dengan melihat jumlah komposisi penduduk yang memiliki pendidikan SLTA / Sederajat keatas tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan karena pendidikan formal yang ditamatkan cukup berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh. Artinya, penduduk yang tingkat pendidikannya rendah tidak akan terserap oleh pasar tenaga kerja, akan menjadi pengangguran, sehingga menambah pula jumlah penduduk miskin. Keterkaitan tingkat pendidikan dengan kemiskinan sangat besar, karena pendidikan memberikan kesempatan terhadap individu untuk berkembang melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang rendah, dan kemiskinan juga menghalangi seseorang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi.

Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor saja sebagai penyebab kemiskinan. Faktor lainnya adalah: rendahnya derajat kesehatan; terbatasnya lapangan pekerjaan; dan wilayah yang terisolasi/terpencil.²¹ Keterisolasian menjadi salah satu kendala di Kalimantan Utara, karena masih banyak wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Penduduk di wilayah-wilayah tersebut pun sulit untuk mengakses fasilitas pendidikan yang memadai. Untuk mengikuti ujian akhir berbasis komputer, siswa-siswa harus naik perahu berjam-jam melewati banyak jeram menuju ibukota kabupaten, dan menginap disana.

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya", memberikan jaminan kepada seluruh warga negaranya untuk melaksanakan ibadah atau ritual agamanya. Agama di sini meliputi seluruh sistem kepercayaan, baik agama-agama samawi monotheis, polytheis, maupun agama-agama yang bersumber dari adat istiadat atau kepercayaan leluhur.²²

²¹ Tsumma Lazuardini Imamia, *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pemberantasan Kemiskinan Di Indonesia*, Universitas Brawijaya

²² Sila pertama Pancasila bukan hanya untuk monotheisme. Jika kita membahasnya dalam bahasa Sansekerta ataupun Pali, Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu. Ketuhanan berasal dari kata tuhan yang diberi awalan ke- dan akhiran -an membuatnya menjadi kata sifat, yang bermakna: "mengalami hal" atau "Memiliki sifat-sifat". Dengan kata lain, ketuhanan berarti sifat-sifat tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan tuhan. Kata Maha bisa berarti mulia atau besar (bukan dalam pengertian bentuk). Kata Maha bukan berarti sangat. Kata "esa" bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata "esa" berasal dari kata "etad" yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata "ini"



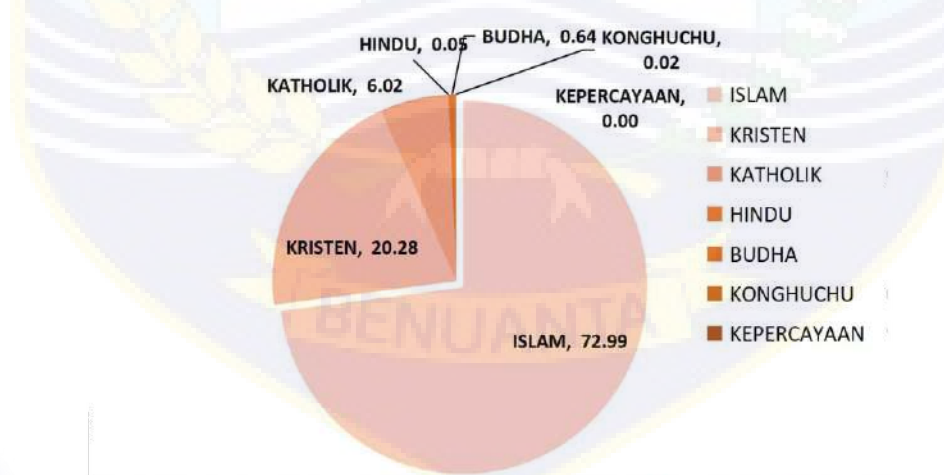
Kemudian dalam hal kebijakan bidang keberagamaan, data penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat menjadi acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait dengan kebebasan dan toleransi kehidupan beragama, dan perencanaan sarana dan prasarana peribadatan. Data agama penduduk dibagi tiap jenis kelamin dan setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :²³

Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

AGAMA	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
ISLAM	251.059	229.627	480.686	72,99
KRISTEN	70.461	63.067	133.528	20,28
KATHOLIK	21.375	18.242	39.617	6,02
HINDU	174	162	336	0,05
BUDHA	2.126	2.095	4.221	0,64
KONGHUCHU	67	72	139	0,02
KEPERCAYAAN	3	5	8	0,00
TOTAL	345.265	313.270	658.535	100

Dilihat dari tabel diatas penduduk Provinsi Kalimantan Utara didominasi pemeluk agama Islam sebesar 480.686 jiwa (72,99%) disusul kemudian pemeluk agama Kristen sebesar 133.528 jiwa (20,28%) dan Katholik 39.617 jiwa (6,02%) sedangkan Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran Kepercayaan masih sangat sedikit dibawah 1%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.7 Diagram Persentase Penduduk Menurut Agama Kalimantan Utara Tahun 2019



(this- Inggris). Sedangkan kata "satu" dalam pengertian jumlah adalah kata "eka". Jika yang dimaksud dalam sila pertama adalah jumlah Tuhan yang satu, maka kata yang seharusnya digunakan adalah "eka" bukan kata "esa".

²³ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

AGAMA	KABUPATEN / KOTA					TOTAL
	BULUNGAN	MALINAU	NUNUKAN	TANA TIDUNG	TARAKAN	
ISLAM	103.320	26.717	134.325	18.938	197.386	480.686
KRISTEN	28.726	46.804	32.251	3.151	22.596	133.528
KATHOLIK	7.805	6.969	15.115	2.017	7.711	39.617
HINDU	86	76	77	4	93	336
BUDHA	585	255	181	35	3.165	4.221
KONGHUCHU	4	1	77	-	57	139
KEPERCAYAAN	1	-	2	-	5	8
TOTAL	140.527	80.822	182.028	24.145	231.013	658.535

Dari tabel diatas ²⁴ Agama Islam terbesar ada di Kota Tarakan sebesar 197.386 jiwa, diikuti Kabupaten Nunukan 134.325 jiwa, dan Kabupaten Bulungan 103.320 jiwa, Kabupaten Malinau 26.717 jiwa, dan Kabupaten Tana Tidung 18.938 jiwa. Agama kedua terbesar adalah agama Kristen, Kabupaten Malinau merupakan wilayah dengan agama Kristen terbesar dengan jumlah 46.804 jiwa diikuti Kabupaten Nunukan 32.251 jiwa, dan Kabupaten Bulungan 28.726 jiwa, dan Kota Tarakan 22.596 jiwa, serta Kabupaten Tana Tidung 3.151 jiwa.

3. Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1988, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Definisi ini digunakan pada pengajaran di sekolah-sekolah, seperti yang terdapat pada salah satu modul pengajaran sosiologi yang menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Modul tersebut juga menyebutkan bahwa setiap anggota dalam keluarga memiliki peranan yang berbeda. Pada masa lampau, peran ayah seringkali diasosiasikan sebagai pencari nafkah utama. Sementara itu, ibu mengurus semua kebutuhan di rumah, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak namun mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pendefinisian keluarga oleh pemerintah pada masa itu tentunya disesuaikan dengan kondisi riil yang banyak ditemui di masyarakat. Pada akhir tahun 1980-an, keluarga ideal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, dan anak. Tiap anggota keluarga

²⁴ Ibid.



tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi.²⁵ Situasi tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap masyarakat pada masa itu, baik melalui media²⁶ maupun pendidikan. Hal ini tidak mengherankan sebab pembatasan jumlah anak menjadi salah satu prioritas pembangunan utama oleh pemerintah masa itu. Sebagai konsekuensinya, definisi keluarga pun mengikuti arah pembangunan tersebut.

Definisi lain dari keluarga adalah ia merupakan unit terkecil dari masyarakat dalam sistem sosial sebagai tempat untuk belajar bersosialisasi, artinya proses belajar bagi individu menempatkan diri dalam masyarakat dan kelompok sosialnya. Keluarga merupakan embrio atau miniatur berbagai unsur sistem sosial manusia. Oleh karena itu, kondisi keluarga dapat mempengaruhi kualitas sebuah masyarakat. Dalam UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.²⁷ Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya.

Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). *Nuclear family* adalah keluarga inti atau keluarga dasar yaitu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah keluarga, kelompok yang terdiri dari sepasang orang dewasa dan anak-anak mereka. *Extended family* adalah keluarga diluar keluarga inti, yang terdiri dari kakek-nenek, bibi, paman, dan sepupu semua yang tinggal didekatnya atau di rumah yang sama. Besarnya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga relatif diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya namun setiap keluarga berbeda-beda.²⁸

²⁵ Dalam hal ini, peran ayah adalah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Dengan kata lain, ayah adalah orang yang bertanggungjawab di ranah publik. Di lain pihak, ibu adalah orang yang bertanggung jawab di ranah privat atau domestik sebab mereka memiliki tugas utama merawat dan mengasuh anak, serta mengurus keperluan rumah tangga. Anak juga digambarkan sebagai pribadi yang senantiasa menurut perintah baik orang tua

²⁶ Salah satu acara yang menggambarkan keluarga pada tahun 80an adalah sinetron Rumah Masa Depan, yang menggambarkan keluarga ideal, terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan dua anak yang tinggal di desa. Mereka tinggal dalam satu rumah dengan peran yang berbeda dan anak-anaknya digambarkan sebagai anak penurut.

²⁷ BAB I Ketentuan Umum nomor 7 UU No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

²⁸ Sekarang ini sudah banyak adanya satu keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak, menantu dan cucu atau yang disebut dengan *sandwiches family* yaitu kondisi pasangan suami istri yang bersamaan merawat orang tua/mertua dan membesarkan anak-anak serta sekaligus bekerja penuh waktu.



Jika melihat realitas sosial saat ini, beberapa definisi keluarga di atas, ada yang masih relevan dan ada pula yang sudah tidak relevan lagi. Persyaratan yang masih relevan adalah adanya syarat perkawinan, hubungan darah, atau pun adopsi. Syarat lain yang masih relevan adalah fungsi keluarga sebagai penerus kebudayaan.

Hal ini tercermin dalam pengalaman sehari-hari ketika generasi muda lebih banyak belajar dari keluarga mengenai masakan, bahasa, silsilah keluarga, ataupun cara berinteraksi dibandingkan dari pihak lain selain keluarga. Ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat di Indonesia menjadi dasar argumen relevansi syarat ini.

Namun, terdapat pula beberapa syarat yang sudah tidak relevan lagi. Pertama, adanya syarat seluruh anggota keluarga tinggal di bawah satu atap yang sama. Sekarang ini, banyak pasangan yang harus hidup terpisah ataupun banyak orang tua yang tinggal berjauhan dengan anak mereka karena alasan pekerjaan, studi maupun alasan lainnya.

Jarak tidak lagi menjadi alasan terbentuknya keluarga yang utuh karena semakin variatifnya media komunikasi dan alat transportasi yang ada. Seperti konsep *imagined community* yang dikemukakan oleh Anderson (1991), konsep keluarga masa kini pun dapat dibentuk berdasarkan imajinasi dan ikatan perasaan yang dibangun antar anggota dalam keluarga itu tanpa mewajibkan kehadiran fisik mereka pada tempat dan waktu yang sama.

Kedua, adalah syarat keberadaan suami sebagai kepala keluarga dan peran anggota keluarga yang sangat deterministik. Sekarang ini, peran masing-masing anggota dalam keluarga tidak lagi bersifat patron-klien²⁹ seperti masa sebelumnya.

Ibu dapat menjadi kepala keluarga, anak perempuan dapat berfungsi sebagai pencari nafkah utama, dan ayah sebagai pengurus rumah tangga di rumah. Meskipun masih banyak masyarakat yang menyangkal, tetapi keberadaan situasi keluarga seperti ini tidak dapat dipungkiri dapat dijumpai di Indonesia.

Salah satu persoalan yang dapat muncul adalah bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan keluarga itu, dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dengan baik dalam keluarga tersebut.

²⁹ Pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya (Scott, 1983 dan Jarry, 1991). sumber : <http://news.detik.com/opini/d-1367204/negeri-patron-klien-bernama-indonesia> diakses 5 Maret 2020 11.00 WITA



Dengan kondisi seperti diuraikan di atas, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) menjadi sangat penting. KK merupakan kartu identitas bagi sebuah keluarga yang memuat berbagai data penting, seperti nama, susunan anggota keluarga, hubungan, pekerjaan setiap anggota keluarga, dan berbagai informasi penting lainnya. Dalam penggunaannya, kartu keluarga akan sering dipakai sebagai salah satu persyaratan utama dalam pengurusan administrasi dan juga berbagai dokumen penting.

Misalnya, pembuatan akta kelahiran bagi anak, pendaftaran anak masuk sekolah, penggantian KTP, dan berbagai urusan perbankan juga akan membutuhkan kartu keluarga sebagai persyaratannya.

Tabel 3.16 Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

NO	NAMA WILAYAH	JUMLAH KELUARGA	PENDUDUK	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	BULUNGAN	42.299	140.527	3,32
2	MALINAU	21.993	80.822	3,67
3	NUNUKAN	59.529	182.028	3,06
4	TANA TIDUNG	7.369	24.145	3,28
5	TARAKAN	75.785	231.013	3,05
	TOTAL	206.975	658.535	3,18

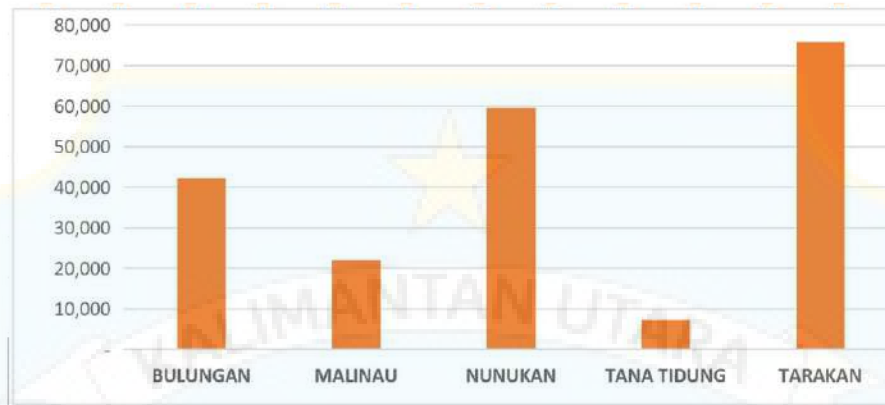
Dilihat dari tabel di atas³⁰ jumlah keluarga di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 206.975 keluarga yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Kota Tarakan memiliki jumlah terbesar yaitu 75.785 keluarga kemudian disusul oleh Kabupaten Nunukan 59.529 keluarga, selanjutnya Kabupaten Bulungan memiliki 42.299 keluarga, dan selanjutnya Kabupaten Malinau sebanyak 21.993 keluarga dan jumlah keluarga terkecil berada di Kabupaten Tana Tidung yaitu 7.369 keluarga.

Sedangkan rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3,18. Kabupaten Malinau memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga tertinggi sebesar 3,67 disusul Kabupaten Bulungan 3,32, Kabupaten Tana Tidung 3,28 dan terkecil Kota Tarakan sebesar 3,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

³⁰ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



Gambar 3.8 Grafik Jumlah Keluarga Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019



Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan dapat digunakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang keluarganya beranggotakan 4 orang.

4. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut.

Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga yang menunjukkan hubungan antar anggota keluarga dengan kepala keluarga, baik mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.

Jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dengan kepala keluarga Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :³¹

³¹ Ibid.



Tabel 3.17 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No	Status Hubungan dg Kepala Keluarga	Laki-laki		Perempuan		Total	
		n	%	n	%	n	%
1	Kepala Keluarga	170.451	26	29.917	5	200.368	30
2	Suami	139	0	-	-	139	0
3	Istri	-	-	136.663	21	136.663	21
4	Anak	162.568	25	136.227	21	298.795	45
5	Menantu	8	0	16	0	24	0
6	Cucu	1.419	0	1.125	0	2.544	0
7	Orang Tua	182	0	1.188	0	1.370	0
8	Mertua	139	0	777	0	916	0
9	Famili Lain	8.843	1	5.915	1	14.758	2
10	Pembantu	10	0	20	0	30	0
11	Lainnya	1.507	0	1.421	0	2.928	0
Total		345.266	52	313.269	48	658.535	100

Dari tabel di atas, nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/istri. Dari 170.451 kepala keluarga laki-laki, terdapat 136.663 istri yang satu kartu keluarga dengan suami. Akan tetapi dari 29.917 kepala keluarga perempuan, hanya 139 orang saja yang suaminya tercatat bersama dalam satu kartu keluarga. Kepala keluarga perempuan dalam kartu keluarganya bisa saja mencantumkan anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu rumah tangga dan lainnya.

Kondisi kepala keluarga perempuan ini juga menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus lajang baik mereka yang belum kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup atau cerai mati. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapatkan perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh perempuan relatif mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki, namun hal itu tidak berlaku keseluruhan kepala keluarga perempuan.

Adapun persentase anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu dan lainnya menunjukkan proporsi yang rendah jika dijumlahkan yaitu hanya dibawah 5 persen, ini mencerminkan bahwa keluarga luas/tambahan (*extended family*) di Provinsi Kalimantan Utara jumlahnya tidak begitu besar. Data status hubungan dengan kepala keluarga di kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :³²

³² Ibid.



Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No	Status Hubungan dg Kepala Keluarga	Bulungan		Malinau		Nunukan		Tana Tidung		Tarakan		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	Kepala Keluarga	41.251	6	21.544	3	56.949	9	7.288	1	73.336	11	200.368	30
2	Suami	123	0	2	0	2	0	-	-	12	0	139	0
3	Istri	31.312	5	15.851	2	36.607	6	4.991	1	47.902	7	136.663	21
4	Anak	61.879	9	40.106	6	82.042	12	11.275	2	103.493	16	298.795	45
5	Menantu	7	0	3	0	8	0	1	0	5	0	24	0
6	Cucu	445	0	319	0	629	0	62	0	1.089	0	2.544	0
7	Orang Tua	341	0	217	0	385	0	34	0	393	0	1.370	0
8	Mertua	193	0	109	0	269	0	18	0	327	0	916	0
9	Famili Lain	3.891	1	2.582	0	3.659	1	429	0	4.197	1	14.758	2
10	Pembantu	8	0	3	0	8	0	2	0	9	0	30	0
11	Lainnya	1.077	0	86	0	1.470	0	45	0	250	0	2.928	0
Total		140.527	21	80.822	12	182.028	28	24.145	4	231.013	35	658.535	100

5. Golongan Darah

Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Dua jenis penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan ABO dan Rhesus (faktor Rh). Di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis antigen selain antigen ABO dan Rh, hanya saja lebih jarang dijumpai. Transfusi darah dari golongan yang tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi transfusi imunologis yang berakibat anemia hemolisis, gagal ginjal, syok, dan kematian. Ilmuwan Austria, Karl Landsteiner, memperoleh penghargaan Nobel dalam bidang Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1930 untuk jasanya menemukan cara penggolongan darah ABO. Jan Janskydi pada tahun 1907 mengklasifikasikan darah manusia ke dalam empat grup, yang hingga kini masih digunakan.³³ Berikut tabel dan grafik jumlah penduduk berdasarkan golongan darah :³⁴

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_darah diakses 7 Maret 2020 pukul 16:37 WITA

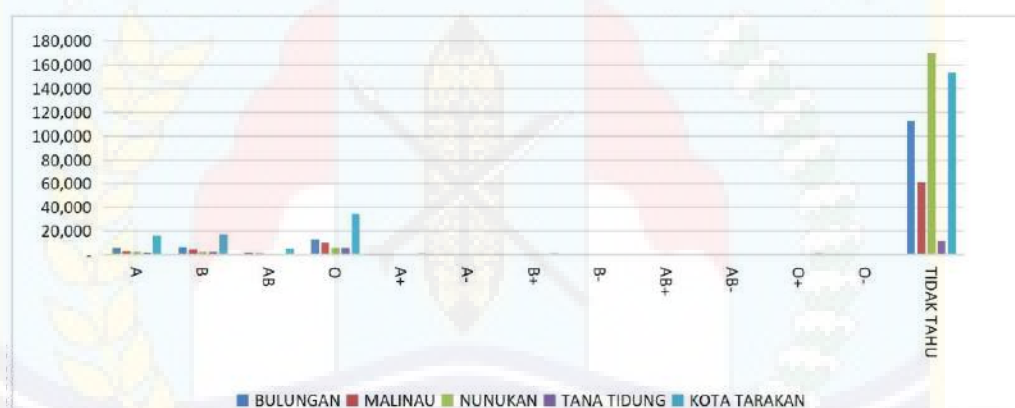
³⁴ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit*



Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019

NO	NAMA WILAYAH	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU	JUMLAH PENDUDUK
		(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)
1	BULUNGAN	5.873	6.088	1.919,00	12.944	245	16,00	262	9	121,00	44	215	93,00	112.698	140.527
2	MALINAU	3.145	4.431	1.187,00	10.028	179	9,00	105	7	31,00	11	97	52,00	61.540	80.822
3	NUNUKAN	2.775	2.628	776,00	5.667	85	7,00	63	14	45,00	41	168	237,00	169.522	182.028
4	TANA TIDUNG	2.309	2.708	748,00	5.966	151	2,00	179	2	39,00	5	199	22,00	11.815	24.145
5	KOTA TARAKAN	16.122	17.227	5.171,00	34.699	1.101	18,00	916	31	336,00	86	1.029	287,00	153.990	231.013
TOTAL		30.224	33.082	9.801	69.304	1.761	52	1.525	63	572	187	1.708	691	509.565	658.535

Gambar 3.9 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019





BAB IV KUALITAS PENDUDUK

Kualitas Penduduk merupakan kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Aspek-aspek tersebut merupakan Indikator Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) dalam pemenuhan kesejahteraan. Kualitas Pendidikan penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dihitung dari angka melek aksara/huruf dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh, aspek kesehatan dihitung dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir; dan aspek kesejahteraan dihitung dari penghasilan per kapita.

Permasalahan kualitas kependudukan di Indonesia masih berkutat pada soal sumber daya manusianya, karena rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, hingga berakibat pada rendahnya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. BKKBN menyebutkan beberapa masalah kependudukan di Indonesia, yaitu:¹

1. Jumlah penduduk besar tetapi kualitas relatif rendah;
2. Laju pertumbuhan penduduk tinggi;
3. Fertilitas relatif tinggi dengan penyebaran yang tidak merata;
4. Angka kematian ibu dan anak tinggi, sedangkan angka harapan hidup relatif rendah;
5. Persebaran penduduk yang tidak merata.

Tabel dan gambar di bab ini bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI yang diolah dan dari OPD terkait.

A. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor terpenting yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas seseorang. Tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Semakin rendah angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan, berarti semakin baik tingkat kesehatan penduduk.

Rendahnya tingkat kesehatan suatu daerah, antara lain disebabkan oleh banyaknya lingkungan yang kotor dan sanitasi yang buruk, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk, pemerintah melakukan berbagai upaya di antaranya melaksanakan

¹ Presentasi Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty yang diwakili oleh Dr. Abidin Syah Siregar, DHSM, M. Kes Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat pada Rapat Kerja Nasional Kesehatan 2016 gelombang II, Jakarta 5 April 2016



program perbaikan gizi khususnya untuk anak-anak balita, peningkatan kesadaran penduduk untuk berperilaku hidup sehat, penambahan sarana dan prasarana kesehatan juga diperlukan untuk meratakan pelayanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, program penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi lingkungan, berupa pembangunan jamban keluarga, pembuatan sumur, penyediaan tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa indikator untuk melihat kualitas penduduk :

1. ASFR (Age Specific Fertility Rate)

Age Specific Fertility Rate atau angka kelahiran menurut umur adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-49 tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas menurut umur. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari perempuan yang terpapar untuk melahirkan yaitu perempuan usia subur dengan memperhatikan karakteristik kelompok umurnya. Secara alamiah potensi fekunditas perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur dan relatif menjadi steril/tidak subur setelah menopause atau usia 49 tahun keatas. Secara sosial ada kecenderungan bahwa saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun.

Pengetahuan mengenai ASFR akan berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang.

Tabel 4.1 Angka Kelahiran Menurut Umur di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

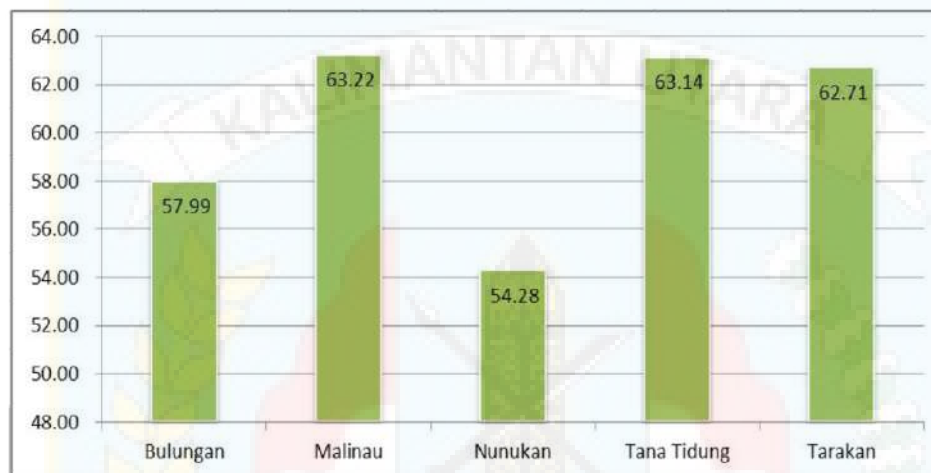
No	Kab/Kota	Jumlah Perempuan 15-49 (Jiwa)	Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)	Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)
1	Bulungan	37.401	2.169	57,99
2	Malinau	22.096	1.397	63,22
3	Nunukan	48.542	2.635	54,28
4	Tana Tidung	6.620	418	63,14
5	Tarakan	64.427	4.040	62,71
Total		179.086	10.659	59,52

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa ASFR di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 59,52 artinya dari 1.000 penduduk perempuan usia 15-49 tahun terjadi kelahiran 59-60 jiwa. Dari data ini dapat dilihat bahwa angka ASFR di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan yang



signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 36.32. Jika dilihat per kabupaten/kota nilai ASFR tertinggi adalah Kabupaten Malinau sebesar 63.22 dan terendah adalah Kabupaten Nunukan sebesar 54.28. Namun seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan pada angka ASFR dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 4.1 Grafik Rasio Angka Kelahiran Menurut Umur Kalimantan Utara Per Kabupaten/Kota Tahun 2019



2. Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi. Tabel data rasio anak dan perempuan di kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

Tabel 4.2: Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

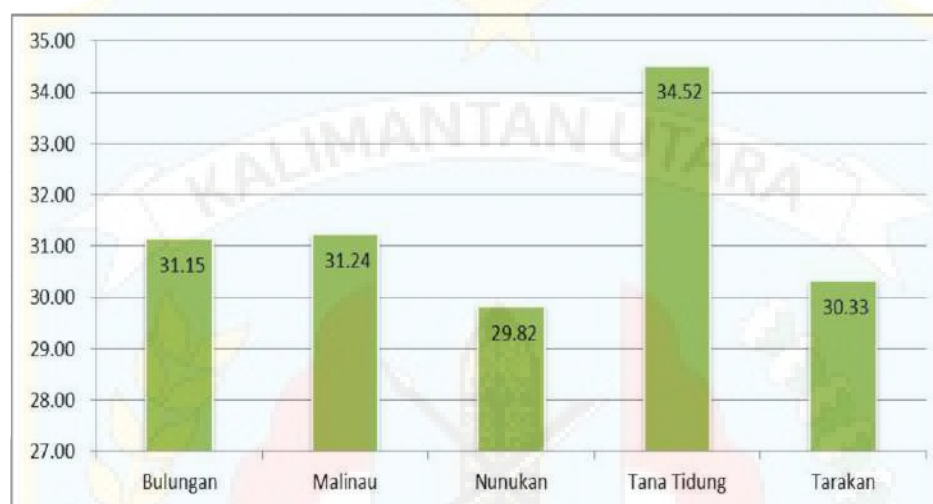
No	Kab/Kota	Jumlah Perempuan 15-49 (Jiwa)	Jumlah Penduduk 0-4 (Jiwa)	Rasio Anak dan Perempuan (CWR)
1	Bulungan	37.401	11.650	31,15
2	Malinau	22.096	6.902	31,24
3	Nunukan	48.542	14.475	29,82
4	Tana Tidung	6.620	2.285	34,52
5	Tarakan	64.427	19.538	30,33
Total		179.086	54.850	30,63

Pada tahun 2019, besarnya rasio anak dan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 30,63 hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 30-31 balita. Tahun 2019 CWR tertinggi di Kabupaten Tana Tidung, yaitu 34,52 disusul Kabupaten Malinau sebesar 31,24; kemudian Kabupaten Bulungan 31,15; Kota Tarakan 30,33; dan Kabupaten



Kabupaten Nunukan 29,82. Angka CWR di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya 30,44. Hanya Kabupaten Nunukan yang mengalami penurunan dari 31,49 menjadi 29,82 kabupaten / kota lainnya mengalami peningkatan.

Gambar 4.2 Grafik Rasio Anak dan Perempuan (CWR) Kalimantan Utara Per Kabupaten/Kota Tahun 2019



B. Pendidikan

Keberhasilan Program pembangunan Pendidikan digambarkan dalam Misi 5 K yaitu Ketersediaan layanan pendidikan, Keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan Kualitas mutu pendidikan, mewujudkan Kesetaraan untuk pendidikan dan misi yang terakhir adalah menjamin Kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Partisipasi sekolah adalah indikator untuk menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda. Dalam hal ini meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase (sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id), APK adalah rasio jumlah murid, berapa pun usianya yang sedang bersekolah di tingkat tertentu, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing tingkat atau jenjang pendidikan. Rumus : $APK\ a = \left(\frac{\text{Siswa } a}{\text{Penduduk usia } a} \right) \times 100$. Kriteria : Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau



banyak anak di luar usia sekolah. Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase (sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id), APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM akan menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Misalnya, seorang penduduk usia 14 tahun maka asumsinya adalah ia saat ini sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sederajat. Rumus : $APM = (\text{Siswa a} : \text{Penduduk usia a}) \times 100$. Kriteria : Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Seperti halnya APK, APM juga sebagai indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik daripada APK, karena APM menunjukkan partisipasi yang sesuai dengan standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Berikut ini adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang disajikan pada tabel berikut :²

Tabel 4.3: Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

NO	JENJANG PENDIDIKAN	APK (%)	APM (%)
1	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	34,76	-
2	SD/SEDERAJAT	104,51	90,41
3	SMP/SEDERAJAT	90,57	63,39
4	SMA/SMK/SEDERAJAT	86,86	59,92

Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di provinsi Kalimantan Utara tertinggi pada jenjang pendidikan SD/Sederajat yaitu sebesar 104,51% diikuti SMP/ sederajat 90,57%. Capaian angka ini menunjukan bahwa penduduk usia sekolah SD dan SMP di Provinsi Kalimantan Utara sedang / masih bersekolah. Dengan kata lain bahwa partisipasi penduduk Provinsi Kalimantan Utara dari SD/Sederajat sampai dengan SMP/Sederajat sudah baik. Selanjutnya APK SMA/SMK/Sederajat pada

² http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolah?kode_wilayah=340000&tahun=2019&tabs=paud
diakses tanggal 18 Maret 2020



tahun 2019 adalah 86,86%, lebih rendah dari APK SD/Sederajat dan APK SMP/Sederajat hal ini diduga karena penduduk usia sekolah SMA/SMK/Sederajat setelah tamat sekolah SMP/Sederajat tidak lagi melanjutkan sekolah ke SMA/SMK/Sederajat.

Tabel 4.3 juga menunjukan selisih antara APK dan APM pada jenjang SD/Sederajat sebesar 14,1%. Artinya terdapat 14,1% siswa tersebut usianya tidak memenuhi usia standar atau tinggal kelas. Selisih antara APK dan APM SMP/Sederajat adalah 27,18%, yang menunjukkan persentase murid yang umurnya tidak memenuhi usia standar atau tinggal kelas. Selisih APM dan APK SMA/SMK/Sederajat yaitu 26,94% yang menunjukkan persentase murid yang umurnya tidak memenuhi usia standar SMA atau kemungkinan tidak naik kelas.

Gambar 4.3 Grafik Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019



Informasi APM ini menggambarkan bahwa belum semua penduduk usia sekolah (usia SD, SMP, SMA) yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, terutama SMA/SMK/Sederajat hanya 59-60 orang dari 100 orang penduduk umur 16-18 tahun yang menempuh pendidikan SMA/SMK/Sederajat. Gambaran di atas menunjukan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah tingkat APM nya. Dengan demikian proporsi murid yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga semakin kecil. Jika diperhatikan lebih teliti ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diduga sebagian besar karena ketidakmampuan ekonomi dan / atau karena murid yang sudah terjun ke dunia kerja, sehingga minat untuk melanjutkan sekolah menjadi rendah. Dan yang juga menjadi salah satu alasan adalah faktor geografis sebagian kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di pedalaman dikarenakan belum adanya sarana sekolah, serta belum adanya transportasi umum yang memadai untuk menempuh sekolah yang berjarak relatif cukup jauh dari



permukiman masyarakat pedesaan (khususnya SMA/SMK) membuat murid enggan melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi.

C. Perekonomian

Dari sisi ekonomi salah satu faktor yang disajikan adalah informasi ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain jika ada pertumbuhan ekonomi maka otomatis penyerapan pertumbuhan tenaga kerja juga ada. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring bertambahnya dinamika penduduk setiap tahun. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. Jika mengacu UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB I pasal 1 ayat 2 menyatakan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang / jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan definisi tenaga kerja menurut *International Labour Organization* (ILO) adalah penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun keatas) yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh uang / pendapatan atau membantu melakukan kegiatan ekonomi. Batasan ini sejalan dengan ketentuan perundangan, khususnya bidang ketenagakerjaan yang membatasi usia minimum pekerja adalah 15 tahun.

1. Proporsi Jenis Pekerjaan

Data penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai jenis pekerjaan sesuai dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2019 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

JENIS PEKERJAAN	KABUPATEN / KOTA					
	BULUNGAN	MALINAU	NUNUKAN	TANA TIDUNG	TARAKAN	KALIMANTAN UTARA
01-Belum/Tidak Bekerja	46,135	21,404	52,114	8,895	70,063	198,611
02-Mengurus Rumah	26,780	13,993	38,601	4,487	46,613	130,474
03-Pelajar/Mahasiswa	18,345	19,313	32,789	3,109	38,696	112,252
04-Pensiunan	609	255	316	50	902	2,132
05-Pegawai Negeri Sipil	4,776	3,186	4,242	1,459	4,741	18,404
06-Tentara Nasional	527	848	260	16	968	2,619
08-Perdagangan	516	111	295	63	400	1,385
09-Petani/Pekebun	14,197	9,458	15,510	1,273	4,200	44,638
11-Nelayan/Perikanan	2,804	59	3,019	649	6,795	13,326
12-Industri	17	1	7	3	43	71



JENIS PEKERJAAN	KABUPATEN / KOTA					
	BULUNGAN	MALINAU	NUNUKAN	TANA TIDUNG	TARAKAN	KALIMANTAN UTARA
13-Konstruksi	34	7	21	6	35	103
14-Transportasi	166	23	69	17	123	398
15-Karyawan Swasta	8,697	3,683	8,296	1,217	27,526	49,419
16-Karyawan BUMN	190	74	179	26	378	847
17-Karyawan BUMD	73	55	64	11	116	319
18-Karyawan Honorer	1,678	2,004	3,000	509	1,487	8,678
19-Buruh Harian Lepas	1,956	546	3,156	263	7,386	13,307
20-Buruh	2,044	395	2,459	183	777	5,858
21-Buruh	438	16	372		1,982	2,862
22-Buruh Peternakan	21	-	16		41	80
23-Pembantu Rumah	64	17	54		155	299
24-Tukang Cukur	6	2	7		23	38
25-Tukang Listrik	14	1	10		12	41
26-Tukang Batu	120	53	87		228	508
27-Tukang Kayu	278	118	104		162	715
28-Tukang Sol Sepatu	3	1	3		11	18
29-Tukang Las/Pandai	33	2	17		42	94
30-Tukang Jahit	59	9	33		69	173
31-Tukang Gigi	3	-	-		1	4
32-Penata Rias	9	7	20		27	64
33-Penata Busana	3	-	-		1	4
34-Penata Rambut	12	2	7		27	51
35-Mekanik	127	62	95		164	460
36-Seniman	2	1	2		16	21
37-Tabib	3	-	-		-	3
38-Paraji	8	-	1		4	14
39-Perancang Busana	1	-	-		2	3
40-Penterjemah	1	1	-		2	4
41-Imam Mesjid	16	3	23		26	75
42-Pendeta	149	226	96		64	559
43-Pastor	3	2	5		4	14
44-Wartawan	12	4	23		35	76
45-Ustadz/Mubaligh	20	9	16		25	73
46-Juru Masak	17	2	2		12	33
47-Promotor Acara	-	-	-		1	1
48-Anggota DPR-RI	-	-	-		1	1
49-Anggota DPD	-	-	-		-	-
50-Anggota BPK	-	-	-		-	-
51-Presiden	-	-	-		-	-
52-Wakil Presiden	-	-	-		-	-
53-Anggota Mahkamah	-	-	-		-	-
54-Anggota	-	-	-		-	-
55-Duta Besar	-	-	-		-	-
56-Gubernur	1	-	-		-	1
57-Wakil Gubernur	-	-	-		1	1



JENIS PEKERJAAN	KABUPATEN / KOTA					
	BULUNGAN	MALINAU	NUNUKAN	TANA TIDUNG	TARAKAN	KALIMANTAN UTARA
58-Bupati	1	1	1		-	4
59-Wakil Bupati	1	1	-		-	3
60-Walikota	-	-	-		1	1
61-Wakil Walikota	-	-	-		2	2
62-Anggota DPRD Provinsi	7	-	5		3	15
63-Anggota DPRD	13	19	22		39	113
64-Dosen	48	21	26		278	376
65-Guru	747	527	730		1,198	3,304
66-Pilot	-	-	-		1	1
67-Pengacara	6	1	3		9	19
68-Notaris	11	2	5		10	28
69-Arsitek	5	-	-		2	7
70-Akuntan	-	-	-		3	4
71-Konsultan	38	8	15		28	91
72-Dokter	56	53	47		122	287
73-Bidan	107	99	97		87	406
74-Perawat	236	159	119		273	822
75-Apoteker	19	3	3		22	47
76-Psikiater/Psikolog	-	-	-		3	3
77-Penyiar Televisi	-	-	-		-	-
78-Penyiar Radio	1	1	-		3	5
79-Pelaut	35	7	40		94	178
80-Peneliti	1	-	-		2	3
81-Sopir	386	168	350		556	1,485
82-Pialang	1	-	-		5	6
83-Paranormal	1	-	3		2	6
84-Pedagang	424	104	227		1,186	1,992
85-Perangkat Desa	190	216	532		7	1,049
86-Kepala Desa	22	57	146		-	245
87-Biarawati	7	5	9		4	29
88-Wiraswasta	6,634	3,077	13,736		11,951	36,681
89-Lainnya	15	2	8		15	40
TOTAL	140,527	80,822	182,028	24,145	231,013	658,535

Tabel. 4.4 diatas menunjukkan penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan dan tercatat di administrasi kependudukannya. Dari tabel tersebut terlihat 5 besar pekerjaan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah karyawan swasta sebanyak 49,419 jiwa (7,50%), Petani/pekebun sebanyak 44,638 jiwa (6,78%), wiraswasta sebanyak 36,681 jiwa (5,57%), Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 18,404 jiwa (2,79%) dan Nelayan/Perikanan sebanyak 13,326 jiwa (2,02%).



Jika merujuk tabel di atas juga terlihat bahwa sektor swasta banyak memberikan lapangan kerja dan sektor wiraswasta merupakan salah satu pilihan utama bagi penduduk untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Begitu pula sektor pertanian dan perikanan masih memberikan peluang pekerjaan yang banyak dan kedepan dapat lebih dimaksimalkan dengan melihat masih besarnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber penghasilan bagi penduduk Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu angka Pelajar / Mahasiswa sebanyak 112,252 jiwa (17,05%) merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah untuk mengembangkan menjadi sumber daya manusia yang dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga kelak akan membantu meningkatkan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Perencanaan pembangunan khususnya di sektor ketenagakerjaan sangat penting untuk wilayah Kalimantan Utara khususnya di ibukota provinsi untuk menciptakan kualitas pembangunan masyarakat.

2. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran)

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan atau mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan. Berikut ini disajikan data perkiraan pengangguran berdasarkan hitungan selisih penduduk Belum / Tidak Bekerja dengan penduduk prasekolah 0-6 tahun, penduduk usia 7 tahun keatas dianggap memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai Pelajar / Mahasiswa. Hasil estimasi angka pengangguran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5: Angka Pengangguran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

URAIAN	KABUPATEN / KOTA					
	BULUNGAN	MALINAU	NUNUKAN	TANA TIDUNG	TARAKAN	KALIMANTAN UTARA
Belum/Tidak Bekerja	46.135	21.404	52.114	8.895	70.064	198.612
Usia Pra Sekolah < 6 tahun	17.196	10.200	21.813	3.386	28.647	81.242
Selisih (Angka Pengangguran)	28.939	11.204	30.301	5.509	41.417	117.370

Tabel 4.5 menunjukkan angka Belum / Pekerjaan di provinsi Kalimantan Utara sebesar 198.612 jiwa atau sebesar 30,16%. Dari tabel tersebut angka pengangguran tertinggi berada di Kota Tarakan sebesar 41,417jiwa, Kabupaten Nunukan sebesar 30.301 jiwa diikuti Kabupaten Bulungan yakni 28.939 jiwa, Kabupaten Malinau 11.204 jiwa dan angka pengangguran terendah di Kabupaten Tana Tidung sebesar 5.509 jiwa. Jika angka-angka tersebut dikurangi dengan jumlah usia pra



sekolah < 6 tahun maka jumlah angka perkiraan pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 117,370 jiwa atau 17,82% dari tahun 2018 sebesar 119.505 jiwa atau 18,43%. Hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara untuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keterampilan kerja. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka pengangguran penduduk harus ditangani dengan baik seperti misalnya memberikan bekal keterampilan kerja khusus sesuai permintaan pasar melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dan lembaga pelatihan lainnya baik pemerintah maupun swasta, sehingga mereka dapat terserap di dunia kerja ataupun menciptakan sendiri lapangan kerja sehingga masyarakat yang belum / tidak bekerja dapat mendapat pekerjaan dan penghasilan. Jika angka pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan seperti : kriminalitas, angka kemiskinan bertambah dan meningkatnya biaya bantuan sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Indikator ini sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

D. Sosial

1. Angka Penyandang Cacat (*Disabilitas*)

Isu sosial berikutnya adalah disabilitas. Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan pemerintah daerah dalam memberikan program atau infrastruktur pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas / penyandang cacat, data penyandang cacat Provinsi Kalimantan Utara disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.6: Jumlah Penyandang Cacat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No	Jenis Kecacatan	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Tarakan	Total
1	Cacat Fisik	74	27	41	15	53	210
2	Cacat Netra/Buta	43	11	15	5	17	91
3	Cacat Rungu/ Wicara	59	23	17	5	51	155
4	Cacat Mental/ Jiwa	36	21	15	7	33	112
5	Cacat Fisik dan Mental	18	7	15	5	17	62
6	Cacat Lainnya	42	15	69	4	37	167
Total		272	104	172	41	208	797

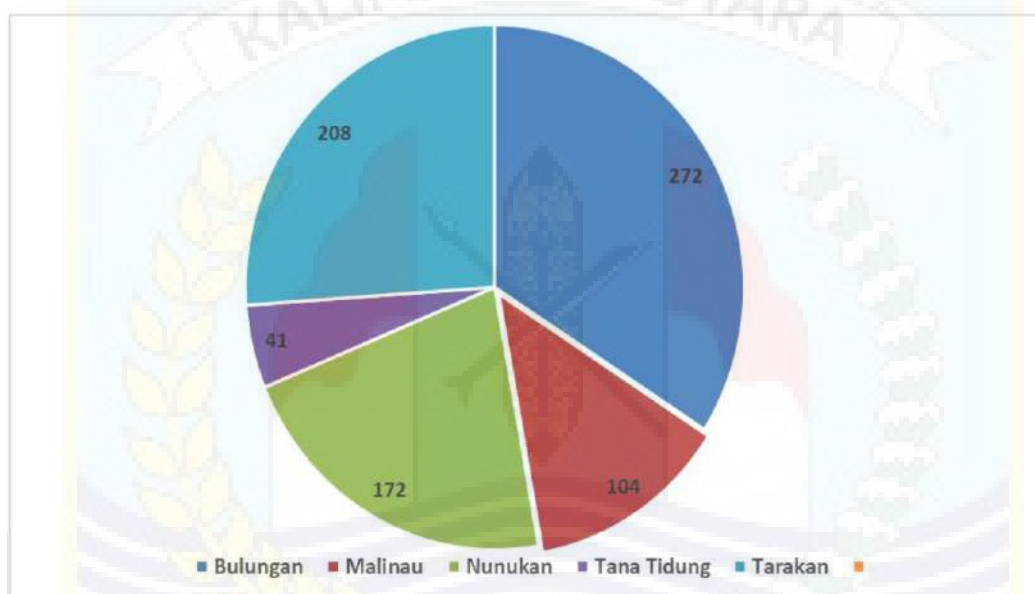
Jumlah penyandang cacat di Provinsi Kalimantan Utara penduduk tahun 2019 tercatat 797 jiwa atau 0,12% turun 0,01% dari tahun 2018. Angka ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk provinsi Kalimantan Utara. Meskipun jumlahnya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk tetap



diberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas layanan umum lainnya serta perlunya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi para penyandang disabilitas.

Jika dilihat dari penyebarannya maka Kabupaten Bulungan memiliki penduduk disabilitas tertinggi yaitu sebanyak 272 jiwa, Kota Tarakan sebanyak 208 jiwa serta Kabupaten Nunukan 172 jiwa, Kabupaten Malinau 104 jiwa dan Kabupaten Tana Tidung 41 jiwa. Grafik penyandang cacat Provinsi Kalimantan Utara disajikan sebagai berikut :

Gambar 4.4 Grafik Jumlah Penyandang Cacat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019



2. Pencapaian Peserta KB Baru (PB)

Perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi Peserta KB Baru (PPM PB) atau target pencapaian Peserta KB Baru tahun 2019 di seluruh Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan sebanyak 16.629 akseptor yang terbagi di 5 Kabupaten/Kota. Adapun capaian Peserta KB Baru Provinsi Kalimantan Utara di Tahun 2019 sebanyak 17.119 akseptor atau 102,9% dari PPM PB Tahun 2019. Apabila dilihat menurut metode kontrasepsi maka capaian Peserta KB Baru di Tahun 2019 terdiri dari IUD sebanyak 629 akseptor (96,5% dari PPM sebanyak 652 akseptor), MOW sebanyak 362 akseptor (107,7% dari PPM 339 akseptor), MOP sebanyak 0 (0% dari PPM sebanyak 5 akseptor) IMPLANT sebanyak 870 akseptor (147,7% dari 589 akseptor), Suntikan sebanyak 12.174 akseptor (101,7% dari PPM sebanyak 11.968 akseptor), Pil sebanyak 1.546 akseptor (72,5% dari PPM sebanyak 2.133 akseptor) dan Kondom sebanyak 1.535 akseptor (162,8% dari PPM sebanyak 943 akseptor).



Tabel 4.7
PPM dan Realisasi Pencapaian Peserta KB Baru Total
Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2019

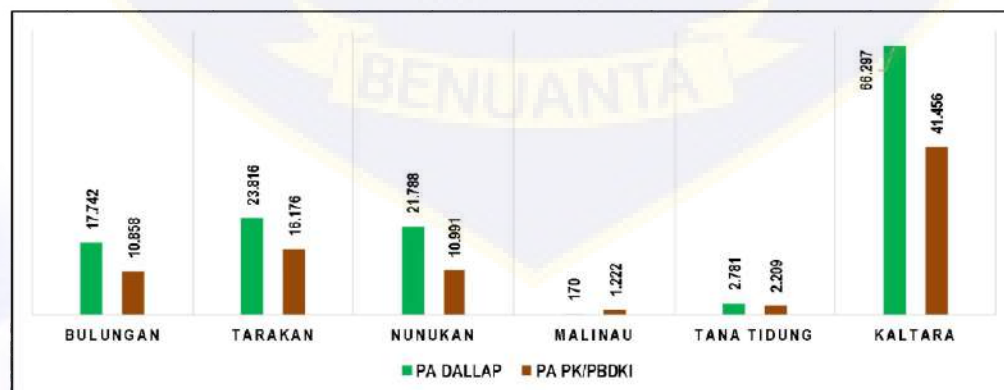
METODE KONTRASEPSI	PPM 2019	PENCAPAIAN S.D. DESEMBER 2019		% PENC. DES' 2018	INFORMED CONSENT		PB JKN	
		JUMLAH	% THD PPM		IC PB	%	PB JKN	%
IUD	652	629	96,5	97,5	613	97,5	353	56,1
MOW	339	365	107,7	111,7	357	97,8	293	80,3
MOP	5	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
KONDOM	943	1.535	162,8	125,3			713	46,4
IMPLANT	589	870	147,7	71,3	790	90,8	453	52,1
SUNTIK	11.968	12.174	101,7	102,2	11.574	95,1	2.598	21,3
PIL	2.133	1.546	72,5	63,1			407	26,3
TOTAL	16.629	17.119	102,9	96,4	13.334	95,0	4.817	28,1
PRIA	948	1.535	161,9	124,7			713	46,4
MKJP	1.585	1.864	117,6	87,1			1.099	59,0

Sumber : Aplikasi Statistik Rutin (Laporan Pelayanan Kontrasepsi), BKKBN Prov. Kaltara

3. Peserta KB Aktif (PA)

Capaian Peserta KB Aktif (PA) total hingga bulan Desember 2019 sejumlah 66.297 peserta atau 111,87% dari PPM PA yang berjumlah 59.262. Adapun pencapaian peserta KB Aktif tertinggi secara kuantitas di Kota Tarakan yang berjumlah 23.816 akseptor dan terendah di Malinau yang berjumlah 170 akseptor. Untuk pencapaian PA terhadap PPM PA yang berada di atas rata-rata provinsi diantaranya di Kabupaten Nunukan (175,05%), Kabupaten Malinau (386,36%), Kabupaten Tana Tidung (134,54%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Gambar berikut ini.

Gambar 4.5
Grafik Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2019



Sumber : Aplikasi Statistik Rutin (Laporan Pengendalian Lapangan), BKKBN Prov. Kaltara



BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan adalah kunci akses terhadap pelayanan publik yang disediakan pemerintah bagi seluruh warga negara. Sebagai warga negara kita wajib memiliki dokumen kependudukan seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

Dokumen kependudukan ini berkekuatan hukum mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain.

Bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat *database* kependudukan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Tabel dan gambar di bab ini bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI yang diolah dan dari OPD terkait.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dengan kepala keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua, di SIAK terbaru versi 7 ada penambahan golongan darah dan status perkawinan tercatat atau belum tercatat.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah persentase kepemilikan kartu keluarga di Provinsi Kalimantan Utara :¹

¹ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Data Konsolidasi Bersih (DKB) Per Desember Tahun 2019



Tabel 5.1: Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

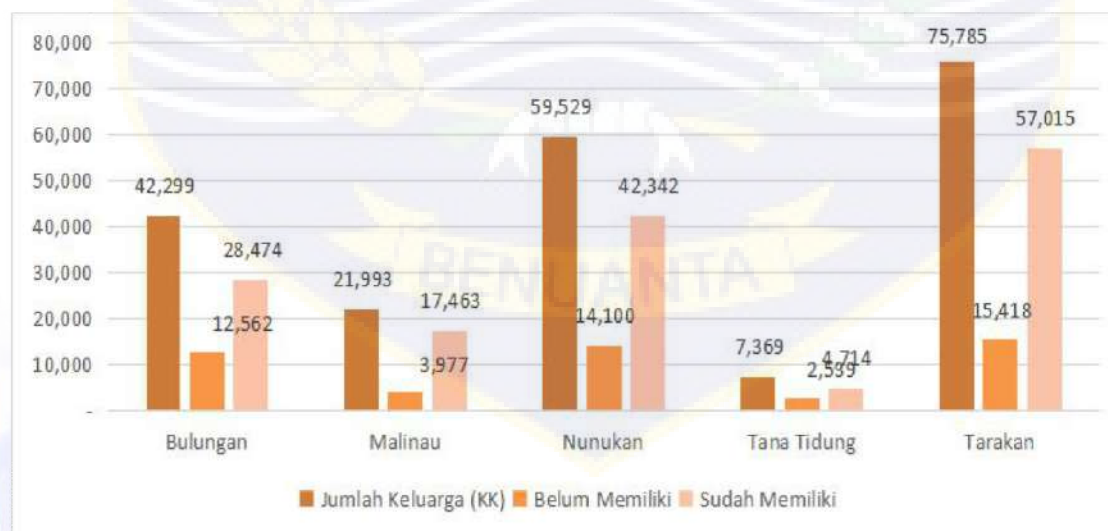
No	Kab/Kota	Jumlah Keluarga (KK)	Kepemilikan Kartu Keluarga			
			Belum Memiliki		Sudah Memiliki	
			(KK)	(%)	(KK)	(%)
1	Bulungan	42.299	12.562	30	28.474	67
2	Malinau	21.993	3.977	18	17.463	79
3	Nunukan	59.529	14.100	24	42.342	71
4	Tana Tidung	7.369	2.539	34	4.714	64
5	Tarakan	75.785	15.418	20	57.015	75
Total		206.975	48.596	23	150.008	72

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di Provinsi Kalimantan Utara. Dari 206.975 jumlah keluarga yang memiliki KK adalah 150.008 atau sebesar 72%. Sedangkan jumlah keluarga yang belum memiliki kartu keluarga sebesar 48.596 atau sebesar 23%. Hal ini yang perlu diperhatikan sehingga perlu dicari solusi masalahnya.

Salah satu penyebabnya adalah letak desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih sulit dijangkau dari pusat pemerintahan kecamatan seperti pada Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Grafik jumlah kepemilikan Kartu Keluarga disampaikan sebagai berikut :

Gambar 5.1 Grafik Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019





B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia.

Berdasarkan pasal 63 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, misalnya urusan perbankan, sertifikat tanah, perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut kepemilikan KTP pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.2 Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019**

No	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)	Wajib KTP (Jiwa)	Sudah Rekam KTP-EI (Jiwa)	Belum Rekam KTP-EI	Persentase Kepemilikan KTP
1	Bulungan	140.527	97.711	95.328	1.809	97,56
2	Malinau	80.822	54.017	49.405	4.293	91,46
3	Nunukan	182.028	123.099	119.038	3.145	96,70
4	Tana Tidung	24.145	15.875	15.304	497	96,40
5	Tarakan	231.013	158.224	152.564	3.859	96,42
Total		658.535	448.926	431.639	13.603	96,15

Tabel di atas menampilkan penduduk wajib KTP Provinsi Kalimantan Utara yang telah melaksanakan perekaman KTP-EI. Terlihat bahwa dari 448.926 jiwa wajib KTP, sebanyak 431.639 telah melakukan perekaman atau 96,15%.

Sejalan dengan pelaksanaan program pemerintah, penduduk yang masih mempunyai KTP non Elektronik dirubah menjadi KTP Elektronik.

Proses perekaman dan pencetakan KTP Elektronik ini terkadang terkendala oleh gangguan jaringan dan distribusi alat dan bahan seperti blangko, *ribbon*, *film* dan lain lain yang terbatas.

Grafik jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ditampilkan sebagai berikut :²

² Ibid.



Gambar 5.2: Grafik Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019



C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk anak-anak berusia 0-16 tahun atau belum menikah sebagai bukti perhatian pemerintah untuk memberikan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa mengenal usia.

Tabel berikut adalah data kepemilikan KIA se-Provinsi Kalimantan Utara :³

Tabel 5.3 Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No	Kab/Kota	Anak 0-16 (Jiwa)	Anak Memiliki KIA (Jiwa)	Anak Belum Memiliki KIA (Jiwa)	Persentase Kepemilikan KIA (%)
1	Bulungan	42.816	10.556	32.260	24,65
2	Malinau	26.805	9.773	17.032	36,46
3	Nunukan	58.926	9.368	49.558	15,90
4	Tana Tidung	8.270	5.310	3.115	64,21
5	Tarakan	72.789	15.997	56.792	21,98
Total		209.606	51.004	158.757	24,33

Dari tabel kepemilikan KIA diatas Kabupaten Tana Tidung memiliki persentase terbesar 64,21%, Kabupaten Malinau 36,46%, Kabupaten Bulungan 24,65%, Kota Tarakan 21,98% dan Kabupaten Nunukan 15,90%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

³ Ibid.



Gambar 5.3 Grafik Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019



D. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia.

Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya.

Saat ini untuk mempermudah masyarakat memiliki atau membuat Akta Kelahiran jika masyarakat tidak memiliki dokumen pendukung (surat kelahiran, dll) dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk mendapatkannya.

Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya, data kepemilikan akta kelahiran disajikan sebagai berikut :⁴

⁴ Ibid.

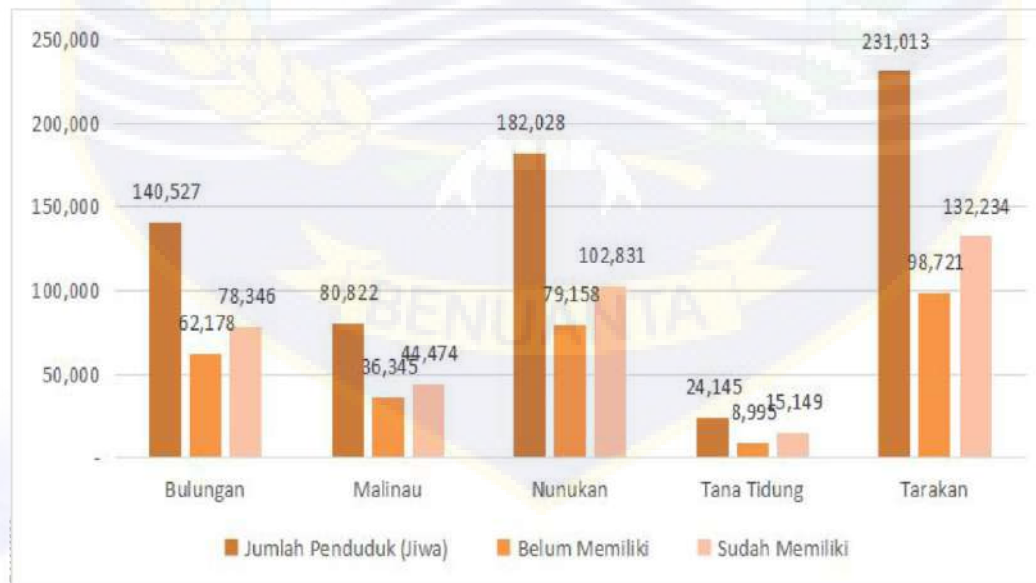


Tabel 5.4 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kelahiran			
			Belum Memiliki		Sudah Memiliki	
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
1	Bulungan	140.527	62.178	44	78.346	56
2	Malinau	80.822	36.345	45	44.474	55
3	Nunukan	182.028	79.158	43	102.831	56
4	Tana Tidung	24.145	8.995	37	15.149	63
5	Tarakan	231.013	98.721	43	132.234	57
TOTAL		658.535	285.397	43	373.034	57

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk provinsi Kalimantan Utara yang memiliki akta kelahiran sebesar 57 persen sebesar 373.034 jiwa, sedangkan sebesar 285.397 jiwa atau 43 persen penduduk belum mempunyai akta kelahiran. Bila dilihat berdasarkan wilayah maka kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Tana Tidung adalah yang tertinggi, yaitu 63 %, Kota Tarakan 57%. Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan 56 % dan Kabupaten Malinau 55%. Pada grafik berikut ini dapat dilihat jumlah kepemilikan akta kelahiran di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara :

Gambar 5.4 Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019





Data kepemilikan akta kelahiran anak umur 0 – 18 tahun yang menjadi salah satu prioritas kepemilikan dokumen kependudukan seperti disajikan tabel berikut :⁵

Tabel 5.5 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-18 Tahun di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No	Kab/Kota	Jumlah Anak 0-18 (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kelahiran			
			Belum Memiliki		Sudah Memiliki	
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
1	Bulungan	44.128	3.920	9	40.215	91
2	Malinau	28.380	5.721	20	22.660	80
3	Nunukan	60.293	10.788	18	49.509	82
4	Tana Tidung	8.698	617	7	8.082	93
5	Tarakan	76.542	11.039	14	65.526	86
TOTAL		218.041	32.085	15	185.992	85

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa Target tahun 2024 Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 tahun adalah 100%⁶ maka dari tabel di atas untuk Provinsi Kalimantan Utara masih mencapai 85%.

Perlu upaya-upaya atau terobosan untuk meningkatkan pencapaian ini dengan pemutakhiran atau peginputan data akta kelahiran bagi penduduk yang sudah memiliki namun belum terinput dalam database serta kemudahan-kemudahan bagi penduduk yang akan mengurus akta kelahiran.

Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki wilayah perbatasan dan pedalaman yang sulit dijangkau perlu peningkatan pelayanan jemput bola⁷ untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah.

Grafik jumlah kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 disampaikan sebagai berikut :

⁵ Ibid.

⁶ <https://www.bappenas.go.id/files/rpjmnn/Narasi%20Rancangan%20RPJMN%202020-2024.pdf> diakses 6 Maret 2020 pukul 11.28 WITA

⁷ Pada tahun 2019 Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (Sipelandukilat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara berhasil masuk Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)RI



Gambar 5.5 Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-18 Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019



2. Akta Perkawinan

Akta perkawinan / nikah merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Tabel berikut ini menyajikan kepemilikan akta perkawinan :⁸

Tabel 5.6 Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Status Kawin (Jiwa)	Kepemilikan Akta Perkawinan			
			Belum Memiliki		Sudah Memiliki	
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
1	Bulungan	66.420	19.217	29	47.135	71
2	Malinau	34.118	15.220	45	18.898	55
3	Nunukan	81.868	39.046	48	42.728	52
4	Tana Tidung	10.912	4.196	38	6.715	62
5	Tarakan	102.994	41.183	40	61.711	60
TOTAL		296.312	118.862	40	177.187	60

Tabel 5.5 menyajikan perbandingan penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan. Jumlah penduduk provinsi Kalimantan Utara yang berstatus kawin sebanyak

⁸ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



296.312 jiwa, terdapat 177.187 Jiwa (60%) yang memiliki akta perkawinan dan 118.862 (40%) jiwa yang tidak memiliki akta perkawinan.

Masih banyaknya pasangan yang belum memiliki akta pernikahan terjadi karena banyak penduduk yang melakukan perkawinan secara agama atau adat saja tetapi tidak tercatat secara administrasi kependudukan, sehingga perkawinan ini belum diakui secara hukum negara.⁹

Jika dilihat per kabupaten/kota, dan dibandingkan dengan data pada periode sebelumnya, Bulungan menjadi kabupaten yang tingkat kepemilikan akta perkawinannya tertinggi 71%, Kabupaten Tana Tidung dengan 62%, Kota Tarakan 60%, Kabupaten Malinau 55%, dan Kabupaten Nunukan 52% relatif lebih kecil hal ini dapat disebabkan karena wilayah pusat pemerintahan yang sulit dijangkau dan jauh di pedalaman sehingga penduduk lebih banyak belum mencatatkan perkawinannya baik yang secara agama atau adat.

Perlu menjadi catatan bahwa dari 118.862 penduduk berstatus kawin tetapi tidak memiliki akta perkawinan, bisa jadi penyebabnya adalah kurang lengkapnya pengisian formulir biodata penduduk atau tidak melampirkan akta perkawinan yang dimiliki sehingga tidak diinput pada saat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Grafik jumlah kepemilikan akta perkawinan disampaikan sebagai berikut :

Gambar 5.6 Grafik Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019



⁹ Terjadi kenaikan kepemilikan akta perkawinan yang signifikan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari tahun 2017 44% menjadi 55% ditahun 2018 dan menjadi 60% ditahun 2019



3. Akta Perceraian

Pasangan yang telah berpisah dan berstatus cerai hidup wajib memiliki akta perceraian. Tabel berikut ini menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai di setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara :¹⁰

Tabel 5.7 Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Status Cerai Hidup (Jiwa)	Kepemilikan Akta Perceraian			
			Belum Memiliki		Sudah Memiliki	
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
1	Bulungan	1.795	665	37	1.115	62
2	Malinau	416	166	40	248	60
3	Nunukan	1.625	976	60	637	39
4	Tana Tidung	223	125	56	98	44
5	Tarakan	3.708	1.485	40	2.199	59
TOTAL		7.767	3.417	44	4.297	55

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian sebesar 4.297 jiwa atau 55% dari penduduk yang berstatus cerai hidup dan yang belum memiliki akta perceraian sebanyak 3.417 jiwa atau 44%.

Persentase penduduk cerai hidup yang tidak memiliki akta perceraian masih sangat tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang belum melaporkan perceraian. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan suatu program kegiatan untuk sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya akta perceraian maupun dokumen kependudukan lainnya.

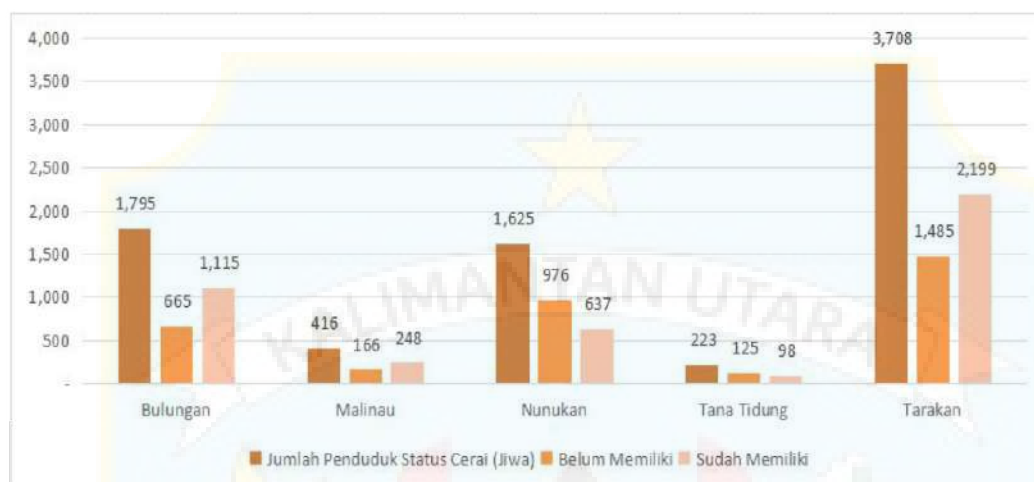
Jumlah kepemilikan akta perceraian Kabupaten Bulungan sebesar 62%. kemudian Kabupaten Malinau 60%, Kota Tarakan 59%, Kabupaten Tana Tidung 44%, dan Kabupaten Nunukan dengan 39%. Namun apabila kita melihat jumlah riil kepemilikan akta perceraian, Kota Tarakan paling banyak dengan 2.199 jiwa, dan Tana Tidung menjadi kabupaten paling sedikit 98 jiwa. Perbedaan ini terjadi tergantung pada jumlah penduduk di masing-masing wilayah tersebut.

Apabila data di atas disajikan dalam bentuk grafik, maka akan nampak seperti berikut ini :

¹⁰ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Op.cit.*



Gambar 5.7 Grafik Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019



4. Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen yang diterbitkan bagi warga negara yang telah meninggal atas laporan dari ahli waris atau pihak lainnya. Hal ini terkait dengan status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun hukum publik. Jika pelaporan akta kematian ini berjalan baik maka akan mendukung pendataan penduduk yang lebih tepat dan akurat dari sisi jumlah penduduk agar biodata yang bersangkutan bisa dihapus dari database sehingga tidak mempengaruhi atau muncul masalah dalam hal jumlah penduduk.

Manfaat akta kematian adalah :

- Persyaratan pengurusan Status Janda atau Duda, sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan kembali
- Persyaratan pengurusan pembagian waris
- Persyaratan pengurusan pensiun
- Persyaratan pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, TASPEN, asuransi, perbankan
- Tertib administrasi kependudukan

. Berikut ini data jumlah kepemilikan akta kematian di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara :¹¹

¹¹ Laporan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Per Desember 2019.



Tabel 5.8 Jumlah Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No	Kab/Kota	Jumlah Kematian Yang Dilaporkan (Jiwa)	Jumlah Penerbitan Akta Kematian (Jiwa)
1	Bulungan	131	104
2	Malinau	1.338	2.032
3	Nunukan	2.531	2.531
4	Tana Tidung	447	447
5	Tarakan	5.873	5.340
Total		10.320	10.454

Dilihat dari tabel di atas, terdapat 10.320 kematian yang dilaporkan dan 10.454 penerbitan akta kematian. Kabupaten Malinau jumlah akta kematiannya lebih besar daripada jumlah kematian penduduk, dikarenakan jumlah kematian yang dilaporkan adalah penduduk yang meninggal di tahun-tahun sebelumnya, sedangkan jumlah akta kematian adalah akta kematian yang dicetak sampai dengan tahun 2019, sehingga penerbitan akta kematian lebih banyak daripada jumlah kematian penduduk yang dilaporkan. Jadi, jumlah akta kematian ini bisa berasal dari laporan kematian sebelum tahun 2019 dan baru diterbitkan akta kematiannya pada tahun 2019. Penerbitan akta kematian Kota Tarakan merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara hal ini dapat dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan pembuatan akta kematian sudah tumbuh dan adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya baik di kelurahan maupun kecamatan dan / atau instansi yang mengurus pemakaman. Grafik jumlah kepemilikan akta kematian disampaikan sebagai berikut :

Gambar 5.8 Grafik Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019





.BAB VI PENUTUP

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ini memuat data kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 yang bersumber dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Buku ini kami harapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan / atau swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan serta bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk mendukung penyusunan dan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tahun berikutnya, diperlukan usaha dan dukungan *stake holder* yang terkait khususnya perbaikan data atau pemutakhiran data kependudukan setiap periode sehingga penyajian tahun yang akan datang lebih baik dan akurat.

Akurasi dan validnya data ini juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, disamping peran aktif aparaturnya atau petugas dan masyarakat dalam melakukan peran stelsel aktif untuk pelayanan publik.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan mendatang sangat dibutuhkan, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan. Demikian dan Terimakasih.



DAFTAR PUSTAKA

Saribun, Daud S, *Pengaruh Jenis Penggunaan Lahan dan Kelas Lereng Terhadap Bobot Isi, Porositas Total, dan Kadar Air Tanah Pada Sub-Das Cikabpudung Hulu*, Laporan Penelitian, Universitas Padjajaran, 2007

Maulana, Deden Rusdian, *Mekanika Tanah II*, Makalah, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2014

Tim, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018*, Tanjung Selor : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, 2019

Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Utara*, Februari 2019

BPS Kalimantan Utara, *Berita Resmi Statistik : Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara Trwulan IV 2018*, No.8/02/65/Th.XXI, 6 Februari 2019

Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Imamia, Tsumma Lazuardini, *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pemberantasan Kemiskinan Di Indonesia*, Universitas Brawijaya

Presentasi Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty yang diwakili oleh Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Pusat pada Rapat Kerja Nasional Kesehatan 2016 gelombang II, Jakarta 5 April 2016

LIPI, *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 13 1 Juni 2018

BAPPEDA & Litbang Provinsi Kalimantan Utara, *RPJMD Kalimantan Utara 2016-2021*, 2016

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, *Data Konsolidasi Bersih (DKB) Per Desember Tahun 2019*

Biro Pengelola Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

Laporan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Per Desember 2019

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/jenis-jenis-longsor>

<https://www.geologinesia.com/2018/05/mengenal-ciri-ciri-iklim-tropis.html>

<http://news.detik.com/opini/d-1367204/negeri-patron-klien-bernama-indonesia> diakses 5 Maret 2020 11.00

WITA

<https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20Rancangan%20RPJMN%202020-2024.pdf> diakses 6

Maret 2020 pukul 11.28 WITA

https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_darah diakses 7 Maret 2020 pukul 16:37 WITA



dukcapilkaltara